



Rencana Kontinjensi

Menghadapi Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat





RENCANA KONTINJENSI

**MENGHADAPI BENCANA TSUNAMI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR GAMBAR..... | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| PENDAHULUAN | 1 |
| LATAR BELAKANG | 1 |
| MAKSUD DAN TUJUAN | 3 |
| PENGERTIAN | 3 |
| RUANG LINGKUP | 4 |
| TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI | 4 |
| AKTIVASI RENCANA KONTINJENSI..... | 5 |
| GAMBARAN UMUM | 6 |
| GEOGRAFIS..... | 6 |
| ADMINISTRASI PEMERINTAH DAN DEMOGRAFI..... | 6 |
| KONDISI TOPOGRAFI | 9 |
| IKLIM..... | 9 |
| POTENSI BENCANA..... | 10 |
| LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 12 |
| PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN | 14 |
| PENILAIAN BAHAYA..... | 14 |
| PENENTUAN KEJADIAN..... | 15 |
| PENGEMBANGAN SKENARIO | 19 |
| KEBIJAKAN DAN STRATEGI..... | 25 |
| PERENCANAAN KLASTER | 29 |
| KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI | 29 |
| KLASTER PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI..... | 32 |
| KLASTER KESEHATAN..... | 36 |
| KLASTER TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 41 |

| | |
|--|----|
| KLASTER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT..... | 47 |
| KLASTER LOGISTIK, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN..... | 50 |
| REKAPITULASI KEBUTUHAN | 54 |
| RENCANA TINDAK LANJUT..... | 55 |
| PENUTUP | 57 |
| LAMPIRAN | 58 |
| Lampiran 1. PARAMETER PENGHENTIAN STATUS TANGGAP DARURAT | 59 |
| Lampiran 2. PROFIL INSTANSI KELOMPOK KERJA | 61 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Peta Provinsi Sumatera Barat | 6 |
| Gambar 2. Geologis Provinsi Sumatera Barat | 10 |
| Gambar 3. Jalur Patahan Sumatera (Semangko) | 10 |
| Gambar 4. Matriks Skala Tingkat Bahaya Bencana di Provinsi Sumatera Barat | 15 |
| Gambar 5. Pusat Gempabumi Merusak Pulau Sumatera (PVMBG, 2004) | 16 |
| Gambar 6. Perkiraan Sumber Gempa yang Mungkin Terjadi di Masa Datang (EOS, Nanyang Technological University, 2011) | 16 |
| Gambar 7. Peta Landaan Tsunami (Sumber: Dinas ESDM) | 20 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|--|----|
| Tabel 1. | Luas dan Data Administrasi Provinsi Sumatera Barat | 7 |
| Tabel 2. | Panjang Garis Pantai dan Jumlah Pulau Kecil Per Kota/Kabupaten..... | 8 |
| Tabel 3. | Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat | 8 |
| Tabel 4. | Penyebaran Potensi Bencana di Sumatera Barat | 12 |
| Tabel 5. | Penilaian Bahaya | 15 |
| Tabel 6. | Kronologis penentuan kejadian bencana gempa berpotensi tsunami | 17 |
| Tabel 7. | Jumlah Penduduk Terancam di Kab/Kota di Pesisir Barat Sumatera..... | 19 |
| Tabel 8. | Dampak Tsunami terhadap Penduduk Sumatera Barat | 20 |
| Tabel 9. | Fasilitas Kritis dan Aset yang tidak berfungsi | 22 |
| Tabel 10. | Fasilitas Umum yang Rusak dan Tidak Berfungsi..... | 23 |
| Tabel 11. | Ketidakberfungsian Pemerintahan | 23 |
| Tabel 12. | Kerusakan Lingkungan | 24 |
| Tabel 13. | Kebijakan dan Strategi | 27 |
| Tabel 14. | Kegiatan Klaster Manajemen dan Koordinasi..... | 30 |
| Tabel 15. | Kebutuhan Klaster Manajemen dan Koordinasi | 31 |
| Tabel 16. | Kegiatan Klaster Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi | 32 |
| Tabel 17. | Kebutuhan Klaster Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi..... | 34 |
| Tabel 18. | Kegiatan Klaster Kesehatan | 37 |
| Tabel 19. | Kebutuhan Klaster Kesehatan | 39 |
| Tabel 20. | Kegiatan Klaster Transportasi, Informasi dan Komunikasi | 42 |
| Tabel 21. | Kebutuhan Klaster Transportasi, Informasi dan Komunikasi | 44 |
| Tabel 22. | Kegiatan Klaster Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana Darurat | 48 |
| Tabel 23. | Kebutuhan Klaster Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana Darurat | 49 |
| Tabel 24. | Kegiatan Klaster Logistik, Penerimaan dan Penyaluran Bantuan | 50 |
| Tabel 25. | Kebutuhan Klaster Logistik, Penerimaan dan Penyaluran Bantuan..... | 53 |
| Tabel 26. | Rekapitulasi Kebutuhan | 54 |
| Tabel 27. | Parameter Pengakhiran Status Darurat Bencana | 59 |

1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pesisir Barat bagian tengah pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia di sebelah Barat, provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu di sebelah Selatan, Provinsi Riau di sebelah Timur dan Provinsi Sumatera Utara di sebelah Utara.

Provinsi Sumatera Barat memiliki dataran rendah di pantai Barat serta dataran tinggi vulkanik di sebelah Timur yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Garis pantai provinsi dari Pasaman sampai ke Pesisir Selatan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia sepanjang 375 km.

Peristiwa vulkanik dan tektonik yang terjadi sejak ribuan tahun lalu telah menjadikan Sumatera Barat memiliki keindahan alam yang menjadi salah satu tujuan wisata domestik maupun manca negara. Bagaikan dua sisi mata uang, Sumatera Barat pun menjadi sangat rentan terhadap berbagai potensi bencana alam, seperti : banjir, erupsi gunung, longsor, gempa dan tsunami.

Kejadian tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 telah mempengaruhi kehidupan sebagian masyarakat Sumatera Barat terutama yang bermukim dan beraktifitas di sepanjang pesisir pantai. Masyarakat seperti kehilangan kemampuan beradaptasi dengan getaran gempa padahal gempa memang sering terjadi, jauh sebelum kejadian tsunami di Aceh, dengan intensitas yang tidak terlalu besar.

Gempa besar pertama setelah peristiwa tsunami Aceh yaitu pada tanggal 10 April 2005 dengan kekuatan 6,7 SR menggambarkan dengan jelas betapa masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan, bahkan diantaranya ada yang mengungsi sampai ke luar kota. Gambaran tsunami begitu menghantui. Masyarakat trauma melalui imajinasi pikiran yang dipengaruhi oleh tayangan media terhadap tragisnya bencana tsunami di Aceh. Dan berdasarkan dari

penelitian para ahli, baik ahli dari dalam negeri dan dunia internasional, ternyata bencana tsunami memang pernah melanda daratan yang sekarang dinamakan kota Padang, pada tahun 1797 dan tahun 1833.

Selanjutnya hampir secara berturut-turut setiap tahun masyarakat Sumatera Barat merasakan gempa besar. Namun begitu, sejak tahun 2006 sudah banyak praktisi kebencanaan yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Jika pada 10 April 2005 sebagian masyarakat masih bingung kemana menyelamatkan diri, maka kondisi berbeda ditemui pada gempa-gempa besar setelahnya.

Pada 12 September 2007, gempa berkekuatan 7,9 SR yang dikenal juga sebagai gempa Bengkulu memaksa sebagian masyarakat untuk evakuasi ke daerah ketinggian atau menjauhi pantai, begitu juga gempa 13 September 2007 yang berlokasi pada 2.526°LS 100.963°BT (sekitar 188 km dari kota Padang – Mentawai) juga membuat masyarakat kembali evakuasi. Edukasi masyarakat memang lebih dititikberatkan pada peringatan dini alami berupa getaran gempa itu sendiri. Bila terasa kuat dan lama (lebih dari satu menit) maka masyarakat harus segera evakuasi, sementara informasi resmi dari pemerintah adalah konfirmasi atas keputusan yang diambil masyarakat; harus melanjutkan evakuasi atau membatalkan evakuasi.

Dengan melihat keadaan masyarakat dan besarnya dampak kerusakan yang disebabkan oleh tsunami, maka perlu penanganan serius untuk menghadapi ancaman bencana ini. Kegiatan penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan dititikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat serta penanganan darurat bencana yang dipayungi oleh payung hukum yang jelas. Karena jika bencana tsunami terjadi, maka tujuh (7) kabupaten/kota di pesisir Barat Sumbar yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia akan terkena dampak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 4 menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermwanaan serta;
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut BPBD Sumbar) mempunyai kewajiban untuk menyusun suatu rencana penanggulangan yang bisa digunakan dan dipahami sebagai pedoman oleh seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan.

Salah satu aspek penting dalam penanggulangan bencana adalah adanya dokumen rencana kontinjensi yang disepakati oleh seluruh instansi/dinas/lembaga terkait.

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPBD Sumbar yang berdiri sejak Bulan Desember Tahun 2009 melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat pasal 5 bahwa BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat bersama dengan 30 anggota kelompok kerja (Pokja) utusan dari 24 instansi/dinas/lembaga menyusun rencana kontinjensi sebagai dokumen pendukung pada saat terjadi kondisi darurat bencana.

Dokumen perencanaan kontinjensi ini menjadi dasar bagi daerah untuk menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana tsunami. Untuk itu, dalam perencanaan kontinjensi ini telah diinventarisasi sumber daya yang bisa dikerahkan begitu juga dengan kesenjangan yang masih harus dicarikan jalan keluarnya.

Perencanaan kontinjensi bukanlah dititikberatkan pada jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh daerah tapi lebih pada komitmen seluruh elemen terkait untuk sepakat bekerja di bawah satu komando (berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana) dan saling berkoordinasi satu sama lainnya agar sasaran penanganan darurat bisa dicapai secara efektif, efisien dan terpadu. Proyeksi kebutuhan akan membantu daerah untuk mencarikan sumber-sumber pembiayaan terhadap upaya penanganan darurat bencana tersebut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen rencana kontinjensi ini disusun sebagai landasan operasional, strategi dan pedoman dalam penanganan darurat bencana tsunami dan sebagai dasar untuk mobilisasi sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

PENGERTIAN

Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan

pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Sesuatu rencana kontinjensi mungkin tidak akan pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana kontinjensi merupakan pra syarat bagi tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif.

Rencana kontinjensi lahir dari proses perencanaan kontinjensi, proses tersebut melibatkan sekelompok orang atau organisasi yang bekerjasama secara berkelanjutan untuk merumuskan dan mensepakati tujuan-tujuan bersama, mendefinisikan tanggungjawab dan tindakan-tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak.

RUANG LINGKUP

Rencana kontinjensi menghadapi ancaman tsunami merupakan dokumen daerah yang memuat tentang kebijakan, strategi, manajemen, upaya-upaya dan aspek koordinasi dalam penanggulangan bencana tsunami, dengan satu skenario kejadian bencana yang disepakati (berasal dari penelitian Prof. Kerry Sieh dan Jamie McCaughey, Earth Observatory Singapore, 2010). Skenario kejadian ini kemudian dikembangkan sesuai dengan dampak yang akan ditimbulkan mulai dari dampak gempa sampai pada dampak tsunami terhadap penduduk dan aset/sumber daya daerah. Rencana kontinjensi ini akan menjadi acuan pembuatan rencana operasi penanganan darurat bencana dalam rapat koordinasi darurat pertama berdasarkan hasil kajian dari tim reaksi cepat.

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI

1. Kegiatan penyusunan rencana kontinjensi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
2. Mengadakan workshop untuk memberikan pemahaman/persepsi yang sama tentang rencana kontinjensi dan hubungannya dengan Prosedur operasi standar penanganan darurat bencana merujuk pada Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2011).
3. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari 30 utusan dari 24 instansi/ dinas/ lembaga yang membahas secara simultan prosedur operasi standar/ prosedur tetap penanganan darurat bencana dan rencana kontinjensi, yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Nomor 360 - 77 - 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman di Provinsi Sumatera Barat.
4. Mengumpulkan data dari seluruh instansi terkait mengenai skenario dampak dan ketersediaan sumber daya
5. Memproyeksikan kebutuhan sesuai dengan data sumber daya yang tersedia dan yang masih harus dipenuhi oleh provinsi untuk penanganan darurat bencana sesuai skenario yang telah disepakati
6. Menyusun draft awal rencana kontinjensi
7. Melaksanakan gladi simulasi untuk uji coba prosedur/dokumen

8. Mengumpulkan input dari hasil evaluasi gladi untuk penyempurnaan draft dokumen rencana kontinjensi
9. Mengadakan audiensi dengan Gubernur dan Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD untuk mendapatkan masukan dan arahan untuk penyempurnaan draft rancangan kontinjensi
10. Mengadakan konsultasi publik yang bertujuan untuk sosialisasi awal dan mendapatkan masukan untuk memfinalkan draft rencana kontinjensi
11. Memformalkan dokumen rencana kontinjensi melalui Peraturan Gubernur

AKTIVASI RENCANA KONTINJENSI

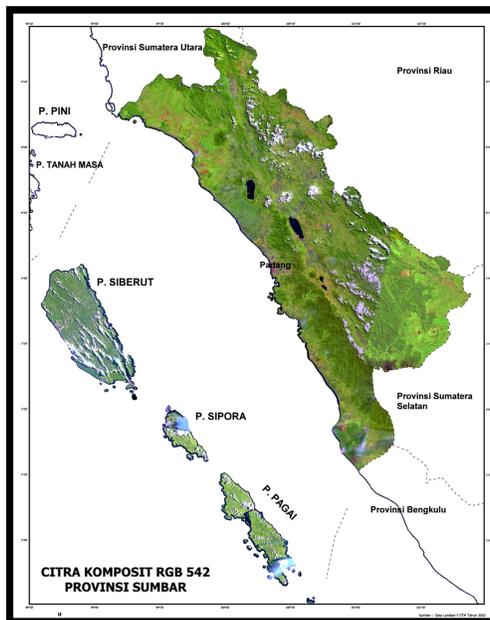
Rencana kontinjensi diaktivasi setelah ada penetapan status darurat bencana tsunami dan telah ditetapkannya Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana oleh Gubernur Sumatera Barat. Rencana kontinjensi diaktivasi dalam rapat penyusunan rencana operasi yang dipimpin oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana.

Data-data rencana pada dokumen rencana kontinjensi bisa dimutakhirkan setiap tahun dan dokumen rencana kontinjensi secara keseluruhan berlaku selama **tiga (3) tahun**. Jika selama waktu yang ditentukan tidak terjadi bencana tsunami, maka dilakukan kaji ulang terhadap rencana kontinjensi.

2

GAMBARAN UMUM

GEOGRAFIS



Gambar 1. Peta Provinsi Sumatera Barat

Secara geografis Provinsi Sumatera Barat terletak pada kedudukan $0^{\circ} 54'$ Lintang Utara sampai dengan $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan serta $98^{\circ} 36'$ sampai dengan $101^{\circ} 53'$ Bujur Timur dengan luas total wilayah sekitar $42.297,30 \text{ Km}^2$ atau $4.229.730 \text{ Ha}$. Termasuk ± 391 pulau besar dan kecil di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas.

Luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat diperkirakan $\pm 186.500 \text{ Km}^2$. Dengan Panjang garis pantai Provinsi Sumatera Barat adalah $\pm 2.420,688 \text{ Km}$, yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota.

ADMINISTRASI PEMERINTAH DAN DEMOGRAFI

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 (sembilan belas) Kabupaten dan Kota, yaitu 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kotamadya/kota. Wilayah kabupaten meliputi Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta 7 (tujuh) Kota yaitu

Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman. Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya yang merupakan kabupaten baru. Pada akhir tahun 2003 terjadi pemekaran 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Masing-masing wilayah tersebut dipecah menjadi dua kabupaten baru yaitu Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, serta Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya.

Secara administratif, Wilayah Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu.
3. Sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.
4. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Tabel 1. Luas dan Data Administrasi Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama Daerah | Luas (Ha) | Ibu Kota | Jumlah | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------|--------|--------|-----|------|--------|
| | | | | Kec | Nagari | Kel | Desa | Jorong |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 601.135 | Tua Pejat | 10 | | 43 | | |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 579.495 | Painan | 12 | 76 | | | 365 |
| 3 | Kab. Solok | 373.800 | Arosuka | 14 | 74 | | | 411 |
| 4 | Kab. Solok Selatan | 334.620 | Padang Aro | 7 | 39 | | | 208 |
| 5 | Kab. Sijunjung | 313.080 | Muaro Sijunjung | 8 | 54 | 1 | | 254 |
| 6 | Kab. Dharmasraya | 296.113 | Sungai Dareh | 11 | 52 | | | 260 |
| 7 | Kab. Tanah Datar | 133.600 | Batusangkar | 14 | 75 | | | 395 |
| 8 | Kab. Padang Pariaman | 132.879 | Pariaman | 17 | 46 | 1 | | 365 |
| 9 | Kab. Agam | 223.230 | Lubuk Basung | 16 | 82 | | | 467 |
| 10 | Kab. 50 Kota | 335.430 | Sari Lamak | 13 | 79 | | | 403 |
| 11 | Kab. Pasaman | 444.763 | Lubuk Sikaping | 12 | 32 | | | 209 |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | 338.777 | Simpang Empat | 11 | 19 | | | 208 |
| 13 | Kota Padang | 69.496 | Padang | 11 | | 109 | | |
| 14 | Kota Solok | 5.764 | Solok | 2 | | 13 | | |
| 15 | Kota Sawahlunto | 27.345 | Sawahlunto | 4 | | 10 | 27 | |
| 16 | Kota Padang Panjang | 2.300 | Padang Panjang | 2 | | 16 | | |
| 17 | Kota Bukittinggi | 2.524 | Bukittinggi | 3 | | 24 | | |
| 18 | Kota Payakumbuh | 8.034 | Payakumbuh | 5 | | 76 | | |
| 19 | Kota Pariaman | 7.336 | Pariaman | 4 | | 17 | 54 | |
| Provinsi Sumatera Barat | | 4.229.721 | | 176 | 628 | 310 | 81 | 3.545 |

Sumber: BPS Sumatera Barat 2010

Dari 19 Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terdapat dua kota dan lima kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Provinsi Sumatera Barat mempunyai kawasan laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 186.580 km² dengan garis pantai sepanjang 375 km mulai dari Pasaman sampai ke Pesisir Selatan. Jika dimasukkan panjang pantai Kepulauan Mentawai maka

panjang garis pantai keseluruhan mencapai 2.420 km. Dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, maka perairan laut Sumatera Barat diperluas lagi 200 mil, sehingga total luas perairan Sumatera Barat menjadi 186.580 km².

Tabel 2. Panjang Garis Pantai dan Jumlah Pulau Kecil Per Kota/Kabupaten

| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Pulau Kecil | Total Garis Pantai (Km) |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Kab. Pasaman Barat | 9 | 152 |
| 2 | Kab. Agam | 2 | 43 |
| 3 | Kab. Padang Pariaman | 2 | 60,5 |
| 4 | Kota Pariaman | 5 | 17,2 |
| 5 | Kota Padang | 20 | 68,13 |
| 6 | Kab. Pesisir Selatan | 53 | 234,2 |
| 7 | Kab. Kep. Mentawai | 254 | 1.402,70 |
| Jumlah | | 345 | 1.977,73 |

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2009

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data Susenas BPS Pusat 2010, tercatat sebanyak 4.846.909 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 1.877.822 jiwa (38,74 %) dan daerah pedesaan 2.969.087 jiwa (61,26 %). Kepadatan penduduk 115 jiwa/km² dengan persentase laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,34 % tahun.

Data pertumbuhan penduduk di beberapa wilayah kab/kota Provinsi Sumatera Barat rata-rata mengalami peningkatan. Seperti Kabupaten Kep. Mentawai, Pesisir Selatan, kab. 50 Kota, Padang dan daerah kab/kota lainnya sebagaimana yang terlihat pada tabel pertumbuhan penduduk di bawah ini.

Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Barat

| No | Nama Daerah | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | Ket |
|----|----------------------|------------------------|---------|---------|---------|-----|
| | | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |
| 1 | Kab. Kep. Mentawai | 40.545 | 54.707 | 60.897 | 76.421 | |
| 2 | Kab. Pesisir Selatan | 315.954 | 372.593 | 389.480 | 429.699 | |
| 3 | Kab. Solok | 355.526 | 422.692 | 438.975 | 348.991 | |
| 4 | Kab. Solok Selatan | * | * | * | 144.236 | |
| 5 | Kab. Sijunjung | 224.361 | 264.287 | 307.810 | 201.627 | |
| 6 | Kab. Dharmasraya | * | * | * | 191.277 | |
| 7 | Kab. Tanah Datar | 319.618 | 342.139 | 327.114 | 338.584 | |
| 8 | Kab. Padang Pariaman | 419.115 | 447.351 | 363.742 | 390.204 | |
| 9 | Kab. Agam | 389.027 | 407.767 | 414.972 | 455.484 | |
| 10 | Kab. 50 Kota | 272.071 | 297.256 | 311.773 | 348.249 | |
| 11 | Kab. Pasaman | 45.966 | 451.151 | 513.674 | 252.981 | |
| 12 | Kab. Pasaman Barat | * | * | * | 364.587 | |
| 13 | Kota Padang | 480.607 | 631.263 | 713.242 | 833.584 | |
| 14 | Kota Solok | 31.700 | 42.702 | 48.120 | 59.317 | |
| 15 | Kota Sawahlunto | 13.536 | 52.695 | 50.868 | 56.812 | |

| No | Nama Daerah | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | Ket |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |
| 16 | Kota Padang Panjang | 34.443 | 38.570 | 40.139 | 47.008 | |
| 17 | Kota Bukittinggi | 70.691 | 83.753 | 91.983 | 110.954 | |
| 18 | Kota Payakumbuh | 78.789 | 90.838 | 97.901 | 116.910 | |
| 19 | Kota Pariaman | * | * | 69.048 | 79.073 | |
| Provinsi Sumatera Barat | | 3.091.949 | 3.999.764 | 4.239.738 | 4.845.998 | |

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2010

* (Tidak ada data ditahun tersebut)

KONDISI TOPOGRAFI

Kelas kelerengan wilayah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

- Kelerengan 0 – 8 % seluas 1.135.972 Ha (26,86%)
- Kelerengan 8 – 15 % seluas 275.989 Ha (6,52%)
- Kelerengan 15 – 25% seluas 545.799 Ha (12,90 %)
- Kelerengan 25 – 40 % seluas 621.052 Ha (14,68%)
- Kelerengan lebih dari 40 % seluas 1.650.918 Ha (39,03%)

Kondisi topografi Provinsi Sumatera Barat dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) satuan ruang morfologi yaitu :

1. Morfologi Dataran

Daerah dengan morfologi dataran terdapat pada wilayah bagian Barat dengan ketinggian antara 0 – 50 m dpl yang meliputi bagian dari ; Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman, dan Kota Padang.

2. Morfologi Bergelombang

Daerah bagian tengah dengan ketinggian antara 50 – 100 m dpl, meliputi; bagian dari Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat.

3. Morfologi Perbukitan

Daerah bagian Timur dengan ketinggian antara 100 – 500 m dpl, meliputi; Kota Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar.

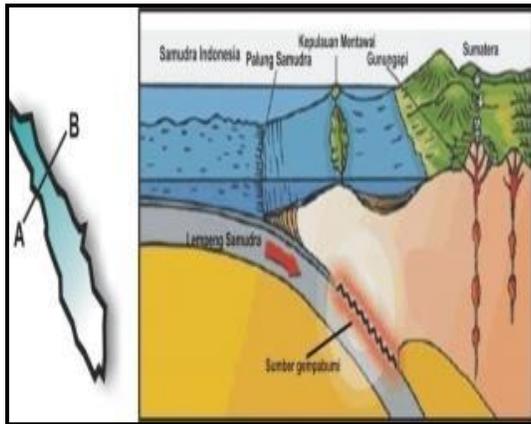
IKLIM

Berdasarkan tipe iklim menurut klasifikasi Schimdt dan Fergusson, wilayah Sumatera Barat mempunyai iklim tipe A, B, C dan D. Suhu rata-rata di pantai Barat berkisar antara 21°C – 38°C, pada daerah-daerah perbukitan berkisar antara 15°C – 33°C. Sedangkan pada daerah dataran di Sebelah Timur Bukit Barisan mempunyai suhu antara 19°C – 34°C. Meskipun umumnya musim kemarau jatuh pada bulan April – Agustus dan musim hujan jatuh pada bulan

September – Maret namun di Pantai Barat masih sering terjadi hujan pada bulan-bulan di musim kemarau.

Hampir setiap tahun di Wilayah Sumatera Barat terjadi 2 (dua) puncak curah hujan maksimum yaitu pada bulan Maret dan Desember, curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juni/Julai. Jumlah curah hujan rata-rata maksimum mencapai 4.000 mm/tahun terutama di wilayah pantai Barat. Sedangkan beberapa tempat di bagian Timur Sumatera Barat curah hujannya relatif kecil antara 1.500 – 3.000 mm/tahun.

POTENSI BENCANA



Gambar 2. Geologis Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada gambar 2, merupakan salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang memiliki tatanan geologi sangat kompleks. Kondisi ini disebabkan letaknya yang berada pada daerah tumbukan 2 lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian Selatan dan lempeng Eurasia di bagian Utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gempa tektonik di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan sekitarnya.

Akibat tumbukan kedua lempeng besar ini selanjutnya menimbulkan gejala tektonik lainnya yaitu busur magmatik yang ditandai dengan munculnya rangkaian pegunungan Bukit Barisan beserta gunung apinya dan sesar/patahan besar Sumatera yang memanjang searah dengan zona tumbukan kedua lempeng yaitu Utara-Selatan.



Gambar 3. Jalur Patahan Sumatera (Semangko)

Dampak negatif wilayah Sumatera Barat secara geologi merupakan wilayah yang berpotensi untuk terjadinya bencana alam beraspek geologi berupa gempa tektonik. Baik yang berpusat di darat yaitu pada jalur patahan sesar Sumatera atau yang lebih dikenal dengan Patahan Semangko seperti terlihat pada gambar 3, maupun yang berpusat di laut yaitu bagian Barat pantai Sumatera yang adakalanya diikuti oleh naiknya permukaan air laut atau yang lebih dikenal dengan

tsunami, disamping bahaya letusan gunung api dan tanah longsor.

Setelah Gempa Aceh terjadi pada akhir tahun 2004 yang diikuti dengan tsunami, perhatian terhadap bencana gempa dan tsunami menjadi perhatian utama di provinsi ini. Rentetan gempa yang terjadi berikutnya: M8,5 SR di Nias pada bulan Maret 2005, M6,9 SR di sekitar laut Mentawai pada bulan April 2005, M6,3 SR di sekitar danau Singkarak pada bulan Maret 2007, M8,4 SR dan M7,9 SR di sekitar perairan Bengkulu dan Sumatra Barat pada 12 dan 13 September 2007 dan terakhir gempa bumi 30 September 2009 dengan M7,6 SR yang terjadi di lepas Pantai Sumatera dan berjarak sekitar 50 km barat laut Kota Padang (wikipedia.org) telah menimbulkan trauma di tengah masyarakat Sumatera Barat. Terlebih lagi dengan perkiraan para ahli seismologi akan terjadinya gempa raksasa berikutnya (*giant earthquake*) di sekitar Mentawai.

Dengan tingginya intensitas gempa yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dan risiko yang begitu besar apabila bencana ini terjadi, maka ditetapkan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami sebagai prioritas dalam penanggulangan bencana. Serta mewujudkan visi penanggulangan bencana Sumatera Barat yaitu **Sumatera Barat Siaga, Tangguh dan Tawakal menghadapi Bencana.**

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Sumbar 2008-2012, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi bencana alam, sebagai berikut:

1. Gempa-bumi
2. Tsunami
3. Banjir
4. Badai/puting beliung
5. Gelombang Pasang
6. Kekeringan
7. Longsor
8. Letusan Gunung Api
9. Kebakaran Hutan dan Lahan
10. Abrasi Pantai

Namun yang dampaknya luas dan potensi kerusakan yang ditimbulkan besar biasanya disebabkan oleh bencana-bencana berikut :

1. Gempabumi
2. Tsunami
3. Banjir
4. Longsor
5. Letusan Gunung Api
6. Kebakaran

Potensi bencana untuk setiap Kabupaten dan Kota berbeda, seperti yang terlihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Penyebaran Potensi Bencana di Sumatera Barat

| No | Lokasi | Bencana | | | | | |
|----|----------------------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|
| | | Gempa | Tsunami | Banjir | Gunung Api | Longsor | Kebakaran |
| 1 | Kota Padang | Potensi | Potensi | Potensi | | Potensi | Potensi |
| 2 | Kota Pariaman | Potensi | Potensi | Potensi | | Potensi | Potensi |
| 3 | Kota Bukittinggi | Potensi | | | Potensi | Potensi | Potensi |
| 4 | Kota Padang Panjang | Potensi | | | Potensi | Potensi | Potensi |
| 5 | Kota Payakumbuh | | | Potensi | Potensi | | Potensi |
| 6 | Kota Sawahlunto | | | | | Potensi | Potensi |
| 7 | Kota Solok | Potensi | | Potensi | | | Potensi |
| 8 | Kab. Padang Pariaman | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 9 | Kab. Agam | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 10 | Kab. Pasaman Barat | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 11 | Kab. Pasaman | Potensi | | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 12 | Kab. Limapuluh Kota | Potensi | | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 13 | Kab. Tanah Datar | Potensi | | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 14 | Kab. Solok | Potensi | | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 15 | Kab. Solok Selatan | Potensi | | Potensi | Potensi | Potensi | Potensi |
| 16 | Kab. Pesisir Selatan | Potensi | Potensi | Potensi | | Potensi | Potensi |
| 17 | Kab. Sijunjung | | | Potensi | | Potensi | Potensi |
| 18 | Kab. Dharmasraya | | | Potensi | | Potensi | Potensi |
| 19 | Kab. Mentawai | Potensi | | | | Potensi | Potensi |

Sumber : BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2011

Dari tabel di atas, maka dapat kita lihat bahwa setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi bencana lebih dari satu. Oleh sebab itu, Provinsi Sumatera Barat perlu memiliki suatu sistem penanggulangan bencana yang baik, sistematis dan terstruktur secara lengkap. Mengingat setiap bencana yang terjadi dapat merenggut ribuan bahkan ratusan jiwa perlu kita selamatkan, maka perlu upaya untuk mengurangi risiko, minimal mengurangi risiko korban jiwa. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Lembaga Penanggulangan Bencana yang bertanggungjawab dalam mengelola risiko bencana, mulai dari pra, saat sampai paska bencana.

LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 18 dan 19 bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Perka BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, maka Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda No. 9 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Begitu juga dengan kabupaten dan kota. Hingga saat ini (2011) hanya dua kota yang belum

membentuk BPBD yaitu Kota Solok dan Kota Payakumbuh. Maka dengan adanya badan atau lembaga penanggulangan bencana yang dimiliki daerah, diharapkan potensi bencana maupun risiko yang dihadapi daerah (Sumatera Barat khususnya) juga dapat berkurang, sehingga masyarakat dapat aman dan nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

3

PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN

PENILAIAN BAHAYA

Penilaian bahaya Provinsi Sumatera Barat didasari oleh dua penilaian ancaman yaitu dengan menilai *probability* atau kemungkinan terjadinya bencana dan dampak kerugian atau kerusakan ditimbulkan dengan asumsi skoring sebagai berikut :

1. Skala probalitas

- Angka 5 pasti (hampir dipasti 80 % - 99 %)
- Angka 4 Kemungkinan besar (60% - 80 %, terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang)
- Angka 3 Kemungkinan terjadi (40%-60 %, terjadi tahun depan , atau sekali dalam 100 tahun)
- Angka 2 Kemungkinan Kecil (20 %-40%, terjadi tahun depan atau sekali lebih dari 100 tahun)
- Angka 1 Kemungkinan sangat Kecil (hingga 20 %)

2. Dampak Kejadian yang Ditimbulkan :

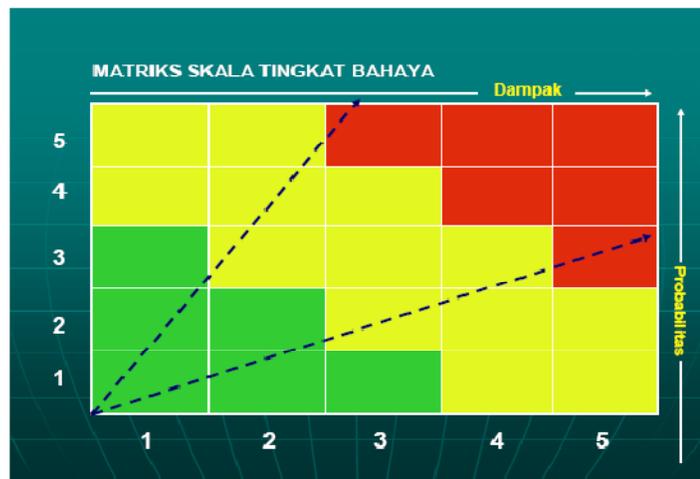
- Angka 5 sangat parah (80 % - 99 %, wilayah hancur dan lumpuh total)
- Angka 4 parah (60% - 80 %, hancur)
- Angka 3 sedang (40%-60 %, Wilayah terkena rusak)
- Angka 2 ringan (20 %-40%, wilayah yang rusak)
- Angka 1 sangat ringan (kurang dari 20 %, wilayah rusak)

Dari instrumen di atas, dapat dihitung *probability* (*kemungkinan*) dan dampak dengan mengasumsikan bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dengan matrik di bawah ini :

Tabel 5. Penilaian Bahaya

| NO | JENIS ANCAMAN BAHAYA | Probability | Dampak |
|----|----------------------|-------------|--------|
| 1. | GEMPA BUMI | 4 | 4 |
| 2. | TSUNAMI | 4 | 4 |
| 3. | BANJIR | 4 | 3 |
| 4. | GUNUNG API | 2 | 3 |
| 5. | LONGSOR | 2 | 2 |

Dari tabel di atas, dapat kita hitung tingkat bahaya dengan menggunakan matrik sebagai berikut:



Gambar 4. Matriks Skala Tingkat Bahaya Bencana di Provinsi Sumatera Barat

Dari matrik di atas dapat kita simpulkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat, bencana yang mempunyai *probability* dan dampak risiko tinggi adalah gempa bumi (4,4) dan tsunami (4,4) dengan hasil perhitungan asumsi matrik kolom berwarna merah.

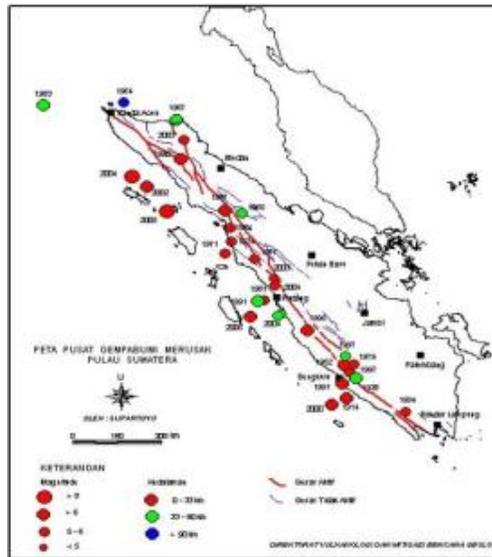
PENENTUAN KEJADIAN

Dengan tingginya intensitas gempa yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dan risiko yang begitu besar apabila bencana ini terjadi, maka Rencana Kontijensi menetapkan **Bencana Tsunami** sebagai prioritas dalam penanggulangan bencana untuk mewujudkan visi penanggulangan bencana Sumatera Barat yaitu **Sumatera Barat Siaga, Tangguh dan Tawakal menghadapi Bencana**.

Provinsi Sumatera Barat terletak di atas zona subduksi. Bagian dari zona subduksi itu bisa menyebabkan gempa bumi yang besar mencakup sekitar 50-230 km dari pantai Barat pulau Sumatera, yaitu dari Padang hingga parit laut dimana *megathrust* Sunda mencapai dasar laut sehingga wilayah Sumatera Barat tergolong rawan gempa bumi tektonik dengan intensitas relatif tinggi yang sangat berpotensi membangkitkan gelombang tsunami. Hal ini dimungkinkan karena di sepanjang lepas Pantai Barat Kepulauan Mentawai terletak zona tumbukan (zona subduksi) antara Lempeng Samudera Hindia – Australia dan

Lempeng Benua Eurasia yang sangat aktif. Zona tumbukan merupakan sumber gempa bumi di laut berupa palung laut yang berada pada lokasi-lokasi yang membentang sekitar 50 – 230 km di sebelah barat pulau Sumatera.

Gempabumi yang terjadi dapat berkekuatan besar, kedalaman dangkal, dan mekanisme sesar/ patahan naik yang berpotensi membangkitkan terjadinya tsunami. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1797 dan 1833 di daerah yang sekarang dinamakan Sumatera Barat. Titik-titik gempabumi merusak yang terjadi di pulau Sumatera dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Pusat Gempabumi Merusak Pulau Sumatera (PVMBG, 2004)

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Earth Observatory of Singapore (EOS) *Nanyang Technological University* Singapura dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perkiraan lokasi sumber gempa yang berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat di masa yang akan datang dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Perkiraan Sumber Gempa yang Mungkin Terjadi di Masa Datang (EOS, Nanyang Technological University, 2011)

Untuk kronologis penentuan kejadian dari tim ahli, digambarkan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Kronologis penentuan kejadian bencana gempa berpotensi tsunami

| NO | Item | Keterangan |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Waktu kejadian Gempa | Hari Senin pukul 10.00 WIB |
| 2. | Kekuatan Gempa | 8,8 SR |
| 3. | Kedalaman | 30 Km |
| 4. | Jarak | 150 Km barat daya kota Padang |
| 5. | Gelombang tsunami 1 | Mencapai Barat kepulauan mentawai dalam waktu 5-10 menit, ketinggian 10-15 meter dari permukaan laut. |
| 6. | Gelombang tsunami lanjutan | Mencapai pesisir barat daratan Sumatera Barat pada menit ke 20 , ketinggian 8-10 meter dari permukaan laut. |
| 7. | Landaan tsunami | 2 – 3 Km pada daratan rendah |
| 8. | Durasi waktu | 3-4 jam setelah gempa dengan 3 kali hantaman gelombang |
| 9. | Dampak kejadian | Rusak nya sarana dan prasarana di kepulauan Mentawai dan pesisir barat daratan Sumatera Barat dan jumlah korban di Kota Padang yang memiliki kerapatan penduduk tinggi |

Sumber: Kerry Sieh, Jamie McCaughey dan Danny Hilman, 2011.

Berdasarkan skenario kejadian dari para ahli seperti tabel diatas, dapat diketahui bahwa tsunami dipicu oleh gempa dengan *magnitude* 8,8 SR, dengan kedalaman 30 km. Sumber gempa (*epicenter*) diperkirakan berjarak sekitar 150 km sebelah barat daya kota Padang. Bisa dimana saja di bagian blok yang membentang sepanjang 50-200 km.

Gelombang tsunami pertama diperkirakan akan mencapai pesisir Barat Kepulauan Mentawai dalam waktu sekitar 5-10 menit setelah gempa dengan ketinggian 10-15 meter dari permukaan laut. Selanjutnya pada menit ke-20 setelah gempa, gelombang tsunami mulai melanda wilayah daratan pesisir Barat Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 8-10 meter dari permukaan laut. Landaan akan masuk ke daratan sejauh sejauh 2-3 km pada daerah dataran rendah dan lebih jauh lagi pada daerah aliran sungai, sedangkan pada dataran yang lebih tinggi, kurang dari jarak tersebut. Karena gelombang tsunami bukanlah gelombang tunggal, maka menurut pemodelan para ahli, akan terjadi tiga kali hantaman gelombang dalam waktu lebih dari 3 jam setelah gempa (Kerry Sieh dan Jamie McCaughey, *Earth Observatory of Singapore, Nanyang Technological University 2011*).

Fenomena ini berpotensi menimbulkan bencana bagi masyarakat yang bermukim di daerah tepi pantai berikut sarana dan prasarana termasuk fasilitas umum. Untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, tidak saja Siberut dan Sipora yang terkena tapi juga sebagian daerah Pagai Utara dan Pagai Selatan.

Begitu juga untuk wilayah daratan disepanjang pesisir barat Sumatera Barat, perlu lebih waspada pada daerah yang memiliki teluk dan daerah dengan pantai landai dan topografi datar-landai. Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk besar dengan kepadatan tinggi, harus lebih waspada.

Skenario kejadian dengan kekuatan gempa 8,8 SR dan sumber gempa pada jarak 150 km Barat Daya kota Padang merupakan skenario terburuk menurut Kerry Sieh dan Jamie McCaughey. Untuk perencanaan, maka skenario kontinjensi ini menambahkan kekuatan gempa menjadi 8,9 SR dan ketinggian tsunami menjadi 10 – 18 meter di pantai Barat Mentawai dan 8 – 12 meter di daratan pantai Sumatera Barat. Sedangkan pemilihan hari Senin pukul 10.00 WIB di saat masyarakat sibuk beraktifitas, termasuk kesibukan di sekolah dan kantor-kantor pemerintah dipilih sebagai skenario kejadian yang masih mampu diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai kapasitas termasuk sumber daya yang tersedia, walaupun tentunya tetap dibutuhkan bantuan dari nasional maupun dunia internasional karena dampak yang ditimbulkan.

Sementara skenario lainnya yang didiskusikan sebelum memilih skenario yang dipaparkan pada skenario penentuan kejadian ini adalah :

1. Skenario waktu kejadian: siang hari di saat hari libur dan semua anggota keluarga berkumpul di rumah (tidak terpencar-pencar) atau anggota keluarga berkumpul di lokasi yang sama, diasumsikan sebagai skenario ringan
2. Skenario waktu kejadian malam hari dan semua anggota keluarga berkumpul di rumah dianggap sebagai skenario sedang

Argumentasi yang mendasari pemilihan skenario kejadian ini adalah: bahwa jika keluarga terpencar-pencar akan menimbulkan kepanikan sehingga risiko korban lebih banyak dibandingkan dua (2) skenario yang disebutkan di atas, dimana anggota keluarga berkumpul di rumah atau di lokasi yang sama.

4

PENGEMBANGAN SKENARIO

Pengembangan skenario mengenai aspek yang akan terkena dampak tsunami; penduduk, fasilitas kritis, fasilitas umum dan pemerintahan didasarkan skenario kejadian tsunami seperti yang telah dipaparkan pada Bab 3, dimana tsunami dipicu oleh gempa berkekuatan 8,9 SR. Berdasarkan hal tersebut, maka 7 kabupaten/kota di sepanjang pesisir Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai akan terkena dampak. Daerah sepanjang pesisir barat Provinsi Sumatera Barat yang berisiko terjadi bencana akibat tsunami adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Jumlah Penduduk Terancam di Kab/Kota di Pesisir Barat Sumatera

| No | Nama Daerah | Jumlah | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|----------------|
| | | Kec | Kel/ Desa/ Nagari | Jiwa Terancam |
| 1. | Kab. Pesisir Selatan | 10 | 57 | 245.916 |
| 2. | Kota Padang | 8 | 78 | 508.804 |
| 3. | Kab. Padang Pariaman | 6 | 9 | 24.861 |
| 4. | Kota Pariaman | 3 | 51 | 25.029 |
| 5. | Kab. Agam | 1 | 3 | 20.644 |
| 6. | Kab. Pasaman Barat | 5 | 12 | 78.782 |
| 7. | Kab. Mentawai | 4 | 33 | 17.313 |
| Provinsi Sumatera Barat | | 37 | 243 | 921.349 |

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2010 dan Perhitungan

Adapun dampak tsunami diperkirakan akan banyak menimbulkan korban dan kerusakan akibat terjadinya tsunami yang didahului oleh gempa bumi dangkal dengan kekuatan yang besar dan dekat dengan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Aspek-aspek yang akan terkena dampak meliputi:

1. Penduduk

Dari data Statistik Provinsi Sumatera Barat, penduduk yang terancam bencana tsunami meliputi wilayah 7 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 81 kecamatan dengan jumlah penduduk 921.349 jiwa.

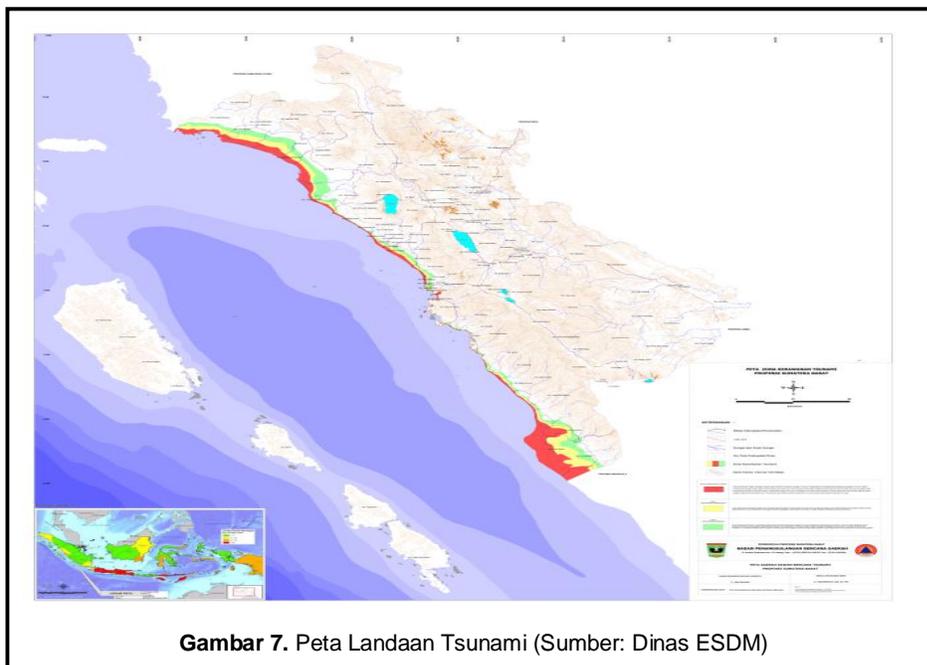
Dari skenario kejadian, diperkirakan bahwa gelombang tsunami yang mengakibatkan dampak yang merusak yaitu pada daerah yang berjarak 0 – 2 km dari pinggir laut dengan ketinggian 2 – 12 m dari permukaan laut serta daerah sekitar aliran sungai. Sementara daerah-daerah dalam radius > 2 km akan mengalami genangan saja sementara kekuatan tsunami telah berkurang.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan skenario untuk asumsi jumlah penduduk yang akan terkena dampak langsung dari kejadian tsunami dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Dampak Tsunami terhadap Penduduk Sumatera Barat

| No. | Kabupaten/Kota | Jiwa Terancam | Meninggal | | Hilang | | Pindah | | Pengungsi | Keadaan Pengungsi | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | Meninggal (%) | Meninggal Jumlah | Hilang (%) | Hilang Jumlah | Pindah (%) | Pindah Jumlah | | Luka Ringan | | Luka Sedang | | Luka Berat | | Non-Rawatan |
| | | | | | | | | | | Luka Ringan (%) | Luka Ringan Jumlah | Luka Sedang (%) | Luka Sedang Jumlah | Luka Berat (%) | Luka Berat Jumlah | |
| 1. | Kab. Pesisir Selatan | 245.916 | 25 | 61479 | 10 | 24.592 | 1 | 2.459 | 157386 | 14 | 22034 | 10 | 15739 | 40 | 62954 | 56659 |
| 2. | Kota Padang | 508.804 | 30 | 152641 | 10 | 50.880 | 1 | 5.088 | 300194 | 9 | 27017 | 10 | 30019 | 40 | 120078 | 123080 |
| 3. | Kab. Padang Pariaman | 24.861 | 30 | 7458 | 10 | 2.486 | 1 | 249 | 14668 | 9 | 1320 | 10 | 1467 | 40 | 5867 | 6014 |
| 4. | Kota Pariaman | 25.029 | 20 | 5006 | 10 | 2.503 | 1 | 250 | 17270 | 19 | 3281 | 10 | 1727 | 40 | 6908 | 5354 |
| 5. | Kab. Agam | 20.644 | 30 | 6193 | 10 | 2.064 | 1 | 206 | 12180 | 9 | 1096 | 10 | 1218 | 40 | 4872 | 4994 |
| 6. | Kab. Pasaman Barat | 78.782 | 30 | 23635 | 10 | 7.878 | 1 | 788 | 46481 | 9 | 4183 | 10 | 4648 | 40 | 18593 | 19057 |
| 7. | Kab. Mentawai | 17.313 | 15 | 2597 | 10 | 1.731 | 1 | 173 | 12812 | 24 | 3075 | 10 | 1281 | 40 | 5125 | 3331 |
| | Jumlah | 921.349 | | 259.009 | | 92.135 | | 9.213 | 560992 | | 62007 | | 56099 | | 224397 | 218488 |

Perkiraan penduduk terancam tsunami di 7 kabupaten/kota di Sumatera Barat diatas, diperoleh dari hasil *overlay* peta landaan tsunami dari Dinas ESDM yang sudah memiliki SNI (gambar 7) dengan data Podes BPS tahun 2010 berdasarkan skenario kejadian tsunami yang sudah disepakati.



Gambar 7. Peta Landaan Tsunami (Sumber: Dinas ESDM)

Asumsi jumlah penduduk meninggal, hilang, pindah, mengungsi dan luka-luka sudah memperhitungkan peningkatan kapasitas yang dilakukan dan juga mempertimbangkan faktor kerentanan. Karena di beberapa daerah belum adanya infrastruktur pendukung evakuasi seperti jalan evakuasi ke arah Timur, gedung-gedung penyelamat ataupun bukit buatan serta mengasumsikan juga bahwa beberapa jembatan akan rusak dan menghambat proses evakuasi.

Skenario ini juga dikembangkan dengan memperhatikan jumlah korban akibat gempa bumi berkekuatan 7,9 SR pada 30 September 2009, yaitu total jumlah korban tewas sebanyak 1.195 orang. Jumlah korban tewas terbanyak berada di Kab. Padang Pariaman dengan jumlah 666 orang, disusul Kota Padang 383 orang, Kab. Agam 81 orang, Kota Pariaman 48 orang, Kab. Pesisir Selatan 9 orang dan Kab. Pasaman Barat 5 orang. Korban luka berat tercatat 619 orang, luka ringan 1.179 orang dan mengungsi sebanyak 6.554 orang. (sumber : sumbarprov.go.id)

Diasumsikan delapan puluh persen (80%) korban meninggal akibat gempa juga menjadi korban meninggal akibat tsunami. Data ini sebagai komparasi bahwa asumsi penduduk terancam dan asumsi penduduk meninggal, luka dan mengungsi telah mempertimbangkan dampak dari gempa bumi yang memicu tsunami dan landaan tsunami sejauh 2 km, sesuai dengan skenario kejadian yang telah disepakati. Selain itu dipertimbangkan juga kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat yang masih tinggi tingkat persaudaraannya sehingga pada gempa 30 September 2009 sebagian besar korban hidup tidak mengungsi tapi ditampung oleh sanak saudaranya.

Pengembangan skenario ini juga mempertimbangkan topografi wilayah di 7 kota / kabupaten rawan tsunami yang datar/landai sehingga masyarakat harus menyelamatkan diri dengan cara berlari sejauh 3 km menjauhi pantai, masih minimnya infrastruktur pendukung untuk evakuasi vertikal dan sebagian besar jembatan yang menghubungkan daerah terpapar dengan daerah aman dikhawatirkan tidak mampu bertahan karena sudah terkena dampak gempa 7,9 SR pada 30 September 2009. Selain itu di beberapa bagian daerah, masyarakat tidak mempunyai jalan evakuasi menuju daerah aman dan sebagainya harus menyusuri pantai terlebih dahulu.

Di kota Padang, hambatan serius adalah kemacetan lalu lintas yang terjadi akibat kepanikan setelah terjadinya gempa besar dan juga bangunan-bangunan tinggi yang mungkin roboh dan menimpa komunitas di dalamnya. Sementara itu untuk Mentawai, mempertimbangkan juga topografi di beberapa bagian daerah/wilayah yang berbukit sehingga masyarakat bisa mencapai daerah aman dalam waktu 10 menit dan memperhitungkan juga sudah adanya program relokasi penduduk ke daerah ketinggian paska tsunami Mentawai 25 November 2010.

Tentu saja skenario ini adalah asumsi untuk menggambarkan dampak yang akan dialami oleh penduduk sehingga pemerintah daerah bisa

memproyeksikan kebutuhan sumber daya untuk penanganan darurat bencana dan juga bisa menjadi acuan untuk meminimalkan asumsi jumlah penduduk yang terkena dampak (meninggal dan luka-luka) melalui Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana lainnya.

2. Fasilitas Kritis

Tsunami diperkirakan juga akan mengancam sebagian fasilitas atau prasarana serta aset yang berada di wilayah pantai Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan inventarisasi fasilitas yang diperkirakan terkena dampak bencana gempa bumi yang diikuti tsunami berupa fasilitas kritis, di antaranya adalah, jalan dan jembatan, jaringan listrik, jaringan air bersih dan sanitasi, Bahan Bakar Minyak (BBM), sarana pelayanan kesehatan, saluran komunikasi, bandara, pelabuhan seperti dijelaskan pada tabel 9. Fasilitas kritis yang dimaksud di sini adalah seluruh aset yang sangat terkait fungsinya sebagai aspek pendukung pemenuhan kebutuhan dasar paska bencana sehingga harus menjadi skala prioritas.

Tabel 9. Fasilitas Kritis dan Aset yang tidak berfungsi

| No | Jenis Kerusakan | Terancam (%) | Rusak (%) | | |
|----|----------------------------------|--------------|-----------|--------|-------|
| | | | Ringan | Sedang | Berat |
| 1. | Jalan dan jembatan | 20 | 10 | 10 | 80 |
| 2. | Jaringan listrik | 40 | 5 | 10 | 85 |
| 3. | Jaringan air bersih dan sanitasi | 35 | 80 | 10 | 10 |
| 4. | Depot Bahan Bakar Minyak (BBM) | 80 | 0 | 0 | 100 |
| 5. | Sarana pelayanan kesehatan | 40 | 10 | 10 | 80 |
| 6. | Saluran komunikasi | 20 | 5 | 10 | 85 |
| 7. | Bandara | 100 | 70 | 0 | 30 |
| 8. | Pelabuhan | 80 | 0 | 0 | 100 |

Dari tabel diatas, pelabuhan dan Depot BBM akan mengalami kerusakan terparah dari bencana yang terjadi disusul oleh fasilitas kritis lainnya. Asumsi kerusakan di atas diperoleh dari kesepakatan bersama berdasarkan skenario kejadian yang telah disepakati.

3. Fasilitas Umum

Selain fasilitas kritis, tsunami juga diperkirakan akan merusak fasilitas umum baik secara fisik maupun fungsi yang dimiliki. Beberapa fasilitas umum yang akan mengalami kerusakan antara lain; kantor-kantor pemerintahan, pasar tradisional dan sekolah seperti dijelaskan pada tabel 10. Fasilitas umum adalah seluruh fasilitas/aset yang perlu dipulihkan fungsinya segera tapi masih bisa menunggu setelah skala prioritas pemulihan fungsi fasilitas kritis teratasi.

Tabel 10. Fasilitas Umum yang Rusak dan Tidak Berfungsi

| No | Jenis Kerusakan | Terancam (%) | Rusak (%) | | |
|----|---------------------|--------------|-----------|--------|-------|
| | | | Ringan | Sedang | Berat |
| 1. | Kantor pemerintahan | 45 | 10 | 20 | 70 |
| 2. | Pasar tradisional | 85 | 5 | 10 | 85 |
| 3. | Sekolah | 45 | 5 | 15 | 80 |

Kantor pemerintahan, pasar dan sekolah akan mengalami kerusakan parah dari bencana yang terjadi, karena sebagian besar berada dekat dengan pantai dan masih banyak yang belum diperbaiki setelah gempa 30 September 2009.

4. Pemerintahan

Dampak bencana yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat karena kerusakan gedung perkantoran dan sebagian pegawai pemerintah kabupaten/kota maupun tingkat kecamatan dan desa menjadi korban atau anggota keluarganya menjadi korban seperti dijelaskan pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Ketidakberfungsian Pemerintahan

| No | Jenis Kerusakan | Terancam (%) | Rusak (%) | | |
|----|---|--------------|-----------|--------|-------|
| | | | Ringan | Sedang | Berat |
| 1. | Kantor Gubernur | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Kantor Bupati/Walikota | 40 | 15 | 20 | 65 |
| 3. | Kantor Dinas di Lingkungan Pemprov dan Pemkab/Pemko | 40 | 20 | 25 | 55 |

Kantor Gubernur Sumatera Barat akan mengalami kerusakan terparah karena berada pada lokasi dengan jarak \pm 1 km dengan pantai dan belum dilakukannya perbaikan menyeluruh setelah gempa 30 September 2009. Begitu juga dengan beberapa kantor Bupati dan Walikota yang berada dekat pantai akan mengalami kerusakan, seperti kantor Walikota Padang, kantor Walikota Pariaman dan kantor Bupati Pesisir Selatan. Sedangkan yang lainnya sudah berada cukup jauh dari pantai dan atau berada di daerah ketinggian. Beberapa kantor dinas, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota juga akan mengalami kerusakan terkena dampak dari bencana yang terjadi.

5. Lingkungan.

Dampak bencana juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap lingkungan berupa kerusakan cukup parah pada lingkungan pantai, terumbu karang, hutan bakau, persawahan dan obyek-obyek wisata pantai seperti dijelaskan pada tabel 12:

Tabel 12. Kerusakan Lingkungan

| No | Jenis Kerusakan | Terancam (%) | Rusak (%) | | |
|----|----------------------|--------------|-----------|--------|-------|
| | | | Ringan | Sedang | Berat |
| 1. | Hutan bakau | 80 | 5 | 15 | 80 |
| 2. | Terumbu karang | 90 | 5 | 15 | 80 |
| 3. | Lingkungan pantai | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4. | Sumber air bersih | 75 | 5 | 15 | 80 |
| 5. | Lingkungan pemukiman | 80 | 10 | 20 | 70 |

Kerusakan lingkungan yang harus segera diantisipasi pada saat tanggap darurat adalah terganggunya sumber air bersih dan lingkungan pemukiman, sementara lainnya dipulihkan pada saat fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan skenario dampak seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka diasumsikan waktu penanganan darurat/ tanggap darurat dibutuhkan selama 90 hari dan dapat dikaji lebih lanjut melalui rapat koordinasi dan evaluasi harian pada masa tanggap darurat bencana.

5

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam upaya penanganan darurat bencana, seluruh aspek terkena dampak perlu dipulihkan fungsinya dengan segera, sehingga kepulihan fungsi tersebut menjadi parameter untuk pengakhiran status darurat bencana (lihat lampiran 1). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun kebijakan dan strategi untuk mendorong lahirnya kegiatan-kegiatan yang mempercepat proses pemulihan darurat bencana (*early recovery*).

Adapun beberapa **Kebijakan** penting yang harus diambil serta **Strategi** yang dapat dilakukan dalam penanganan darurat bencana, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar korban serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanganan darurat bencana tsunami
 - a. Membuat nota kesepahaman dengan pihak swasta terkait pengerahan sumber daya yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Seperti: adanya SPBU khusus untuk pelaku tanggap darurat, pengerahan alat berat dan disertai aturan tertulis mengenai tata layanan.
 - b. Memobilisasi segenap kekuatan personil, sarana prasarana yang ada pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri, Swasta, Perguruan Tinggi, PMI, dan relawan.
 - c. Membuat kesepakatan tertulis/konsensus antar SKPD untuk menjadikan rencana kontinjensi menjadi rencana operasi pada saat terjadi bencana.
 - d. Menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi bencana secara cepat dan akurat serta melaporkan kepada pihak terkait, baik untuk tingkat provinsi maupun pusat serta berbagai pihak yang membutuhkan untuk penggalangan dukungan bantuan dari luar.
 - e. Mengoptimalkan manajemen data dan informasi dalam hal pencatatan bantuan yang diterima dan dikeluarkan (diberikan) kepada korban.
 - f. Mempersiapkan sarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh lokasi bencana.
 - g. Meminta bantuan kepada dunia internasional apabila dibutuhkan.

- h. Mengoptimalkan fungsi posko utama dan posko lapangan sebagai lalu lintas pemberian bantuan dengan tujuan untuk menghindari duplikasi atau keterabaian
 - i. Memberikan pelayanan keamanan kepada lembaga pemberi bantuan agar selamat sampai tujuan (lokasi bencana).
 - j. Melakukan pengawasan dan pengendalian, analisa serta evaluasi terhadap setiap kegiatan penanganan darurat.
 - k. Keluar masuk informasi atau data harus melalui satu pintu, yaitu dari posko utama.
 - l. Memprioritaskan lansia, ibu hamil, anak-anak dan masyarakat yang berkebutuhan khusus.
2. Mengkoordinasikan kegiatan (adanya manajemen koordinasi) penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh semua pihak terkait, baik lembaga/instansi pemerintah, swasta dan relawan.
 - a. Mengaktifkan sistem komando dan kendali tanggap darurat
 - b. Memanfaatkan sistem dan manajemen informasi dan komunikasi, baik tingkat lokal, nasional dan internasional
 - c. Mengerahkan relawan sesuai keahlian yang dibutuhkan pada saat penanganan darurat dan memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku
 3. Menetapkan desentralisasi kewenangan kepada wilayah kab/kota hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan berdasarkan zona wilayah masing-masing serta menetapkan komando khusus (tiap zona terdiri dari 2-3 kab/kota dan dibantu oleh satu daerah tetangga). Namun tetap dalam struktur dan komando provinsi yang telah dibentuk
 - a. Membagi daerah kab/kota yang terkena dampak bencana berdasarkan zona-zona yang diidentifikasi berdasarkan keadaan geografis wilayah (jarak dan luas wilayah tersebut)
 - b. Membentuk komando yang berfungsi untuk mempermudah akses pemerintah dalam memberikan bantuan/kebutuhan daerah nantinya

Dengan demikian terdapat tiga kebijakan yang diikuti dengan beberapa strategi penanganan darurat bencana tsunami (khususnya) di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan dan strategi ini dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Kebijakan dan Strategi

| No. | Kebijakan | Strategi |
|-----|---|--|
| 1. | Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar korban serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanganan darurat bencana tsunami | <p>Membuat nota kesepahaman dengan pihak swasta terkait pengerahan sumber daya yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Seperti: adanya SPBU khusus untuk pelaku tanggap darurat, pengerahan alat berat dan disertai aturan tertulis mengenai tata layanan</p> <p>Memobilisasi segenap kekuatan personil, sarana prasarana yang ada pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri, Swasta, Perguruan Tinggi, PMI, dan relawan.</p> <p>Membuat kesepakatan tertulis/konsensus antar SKPD untuk menjadikan rencana kontinjensi menjadi rencana operasi pada saat terjadi bencana</p> <p>Menugaskan TRC ke lokasi bencana secara cepat dan akurat serta melaporkan kepada pihak terkait. Baik untuk tingkat provinsi maupun pusat serta berbagai pihak yang membutuhkan untuk penggalangan dukungan bantuan dari luar.</p> <p>Mengoptimalkan manajemen data dan informasi dalam hal pencatatan bantuan yang diterima dan dikeluarkan (diberikan) kepada korban.</p> <p>Mempersiapkan sarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh lokasi bencana</p> <p>Meminta bantuan kepada dunia internasional apabila dibutuhkan</p> <p>Mengoptimalkan fungsi posko utama dan posko lapangan sebagai lalu lintas pemberian bantuan dengan tujuan untuk menghindari duplikasi atau keterabaian</p> <p>Memberikan pelayanan keamanan kepada lembaga pemberi bantuan agar selamat sampai tujuan (lokasi bencana)</p> <p>Melakukan pengawasan dan pengendalian, analisa serta evaluasi terhadap setiap kegiatan penanganan darurat</p> <p>Keluar masuk informasi atau data harus melalui satu pintu, yaitu dari posko utama</p> <p>Memprioritaskan lansia, ibu hamil, anak-anak dan masyarakat yang berkebutuhan khusus</p> |

| No. | Kebijakan | Strategi |
|-----|--|---|
| 2. | Mengkoordinasikan kegiatan (adanya manajemen koordinasi) penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh semua pihak terkait, baik lembaga/instansi pemerintah, swasta dan relawan | <p>Mengaktifkan sistem komando dan kendali tanggap darurat</p> <p>Memanfaatkan sistem dan manajemen informasi dan komunikasi. Baik tingkat lokal, nasional dan internasional</p> <p>Relawan yang dikerahkan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat dan memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> |
| 3. | Menetapkan desentralisasi kewenangan kepada wilayah kab/kota hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan berdasarkan zona wilayah masing-masing serta menetapkan komando khusus (tiap zona terdiri dari 2-3 kab/kota dan dibantu oleh satu daerah tetangga). Namun tetap dalam struktur dan komando kodal provinsi yang telah dibentuk | <p>Membagi daerah kab/kota yang terkena dampak bencana berdasarkan zona-zona yang diidentifikasi berdasarkan keadaan geografis wilayah (jarak dan luas wilayah tersebut)</p> <p>Membentuk komando yang berfungsi untuk mempermudah akses pemerintah dalam memberikan bantuan/kebutuhan daerah nantinya</p> |

6

PERENCANAAN KLASTER

Pada bab perencanaan klaster ini diuraikan pembagian klaster yang berpedoman kepada Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana edisi Kedua yang diterbitkan BNPB pada tahun 2011 yaitu tentang jumlah dan nama-nama klaster dan akan menjadi komponen pendukung pada Bidang Operasi (Perka BNPB no. 10 tahun 2008). Kemudian pembagian klaster ini dilakukan juga berdasarkan jumlah penduduk dan luas cakupan wilayah dan aspek-aspek yang akan terkena dampak (terancam) bencana tsunami. Pada masing-masing klaster akan diuraikan tentang sasaran dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/Instansi terakait penanggulangan bencana sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh masing-masing klaster. Maka berdasarkan dampak bencana yang akan timbul, asumsi untuk kegiatan klaster pada saat tanggap darurat adalah selama 90 hari (3 bulan). Berikut merupakan rincian 5 (lima) klaster beserta sasaran dan kegiatan masing-masing yang terdapat dalam rencana kontinjensi menghadapi ancaman tsunami Provinsi Sumatera Barat.

KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI KOORDINATOR : BPBD PROVINSI SUMBAR

A. SITUASI

Apabila terjadi tsunami yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,9 SR, landaan tsunami akan masuk 2-3 km ke daratan pada 7 kabupaten dan kota yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Dampak bencana mengakibatkan aktifitas pemerintahan dan pelayanan publik tidak berfungsi saat terjadi bencana, bangunan dan sarana prasarana rusak berat, alat dan jaringan komunikasi tidak berfungsi (terputus). Maka Kepala Daerah akan menetapkan status darurat bencana. Dalam menghadapi situasi penanganan darurat bencana, diperlukan kesatuan tindak. Untuk itu, Komandan Tanggap Darurat dibantu oleh Koordinator klaster yang berada di bawah Bidang Operasi terutama klaster Manajemen dan Koordinasi melakukan evaluasi harian terhadap rencana operasi yang telah dibuat dan memastikan setiap klaster bekerja sesuai dengan bidang tugasnya dan mengacu pada sasaran yang akan dicapai.

B. SASARAN

1. Tersedianya tenaga operasional yang dapat dimobilisasi untuk penanganan bencana.
2. Terkoordinirnya kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing kluster.
3. Terkendalinya sistem pengamanan lingkungan di kawasan bencana dan di lokasi pengungsian.
4. Terinventarisasinya jumlah personil sarana dan prasarana, peralatan dan logistik lainnya yang dibutuhkan dan digunakan untuk penanganan darurat.
5. Terkoordinirnya seluruh bantuan untuk penanganan darurat yang ditujukan pada masing-masing kluster.
6. Tersedianya data mengenai jumlah korban, dampak kerusakan beserta jumlah kerugiannya, jenis dan jumlah kebutuhan dan laporan situasi yang selalu dimutakhirkan. Telah adanya sistem komando dan kendali yang jelas di tingkat pemerintah pada saat terjadinya tanggap darurat bencana.

C. KEGIATAN

Pada kluster Manajemen dan Koordinasi kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

Tabel 14. Kegiatan Kluster Manajemen dan Koordinasi

| NO | KEGIATAN | PELAKU | PJ | WAKTU PELAKSANAAN |
|----|--|---|-------------|--|
| 1. | Kajian cepat | TNI, Polda Sumbar, Satpol PP, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub dan Kominfo, Dinas PU, PMI, PDAM, PLN | TNI | 1-6 jam setelah bencana terjadi |
| 2. | Pendirian Posko Utama dan Posko Lapangan | TNI, Polda Sumbar, BPBD, Satpol PP, DPRD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub dan Kominfo, RAPI, ORARI, Dinas PU, PMI, Palang Merah Indonesia (PMI), PDAM, PLN, Biro Umum, Biro Pemerintahan SAR, Sospora, Dinas P & K, PTN/PTS | TNI-POLRI | 1-24 jam setelah bencana terjadi |
| 3. | Pembuatan rencana operasi dan menyiapkan tenaga operasional | | BPBD Sumbar | 1-24 jam setelah bencana terjadi |
| 4. | Pengerahan dan mobilisasi sumber daya | | BPBD Sumbar | 1-24 setelah bencana terjadi |
| 5. | Mengkoordinasikan kegiatan masing-masing kluster | | BPBD Sumbar | 1-24 setelah bencana terjadi |
| 6. | Memberikan rekomendasi kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana mengenai perubahan strategi dan rencana operasi | | TNI | 1x24 jam setelah operasi dilaksanakan/ berjalan. Sesuai dengan fakta lapangan yang ada |
| 7. | Membuat laporan pelaksanaan penanganan darurat bencana secara menyeluruh | | BPBD Sumbar | 1x24 jam setelah operasi dilaksanakan/ berjalan. Sesuai dengan kondisi dilapangan |

D. PROYEKSI KEBUTUHAN

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh klaster Manajemen dan Koordinasi, jumlah personel dan peralatan yang dibutuhkan, maka diproyeksikan jumlah biaya untuk klaster ini sebesar **Rp. 284.500.000,-** (dua ratus delapan puluh empat juta, lima ratus ribu Rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya.

Tabel 15. Kebutuhan Klaster Manajemen dan Koordinasi

| No | Jenis Kebutuhan | Satuan | Harga Satuan | Tersedia | Kebutuhan | Kesenjangan | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|---------------|----------------------|------------|--------------|----------|-----------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Tenda Posko | unit | 15.000.000 | 8 | 8 | - | - | BPBD, Dinsos |
| 2 | Genset | unit | 5.000.000 | 8 | 8 | - | - | BPBD, Dinsos, PMI |
| 3 | Tikar | helai | 100.000 | 20 | 20 | - | - | BPBD, Dinsos |
| 4 | Papan data | helai | 50.000 | 5 | 5 | - | - | BPBD, Dinsos |
| 5 | Laptop | unit | 10.000.000 | 2 | 2 | - | - | BPBD, Dinsos |
| 6 | Printer | unit | 1.000.000 | 3 | 3 | - | - | BPBD, Dinsos |
| 7 | Kertas milimeter | gulung | 80.000 | - | 40 | 40 | 3.200.000 | |
| 8 | HT | unit | 1.500.000 | 10 | 10 | - | - | BPBD, Dinsos, RAPI, ORARI |
| 9 | Radio All Band | unit | 15.000.000 | 4 | 4 | - | - | PUSDALOPS BPBD, RAPI, ORARI |
| 10 | TV | unit | 2.500.000 | 1 | 1 | - | - | BPBD |
| 11 | Camera | unit | 4.000.000 | 2 | 2 | - | - | BPBD, Biro Humas |
| 12 | Handycamp | unit | 10.000.000 | 2 | 2 | - | - | BPBD, Biro Humas |
| 13 | Bensin | liter | 4.500 | - | 500 | 500 | 2.250.000 | Beli |
| 14 | Solar | liter | 4.500 | - | 500 | 500 | 2.250.000 | Beli |
| 15 | Peta Provinsi Sumbar | helai | 20.000 | - | 15 | 15 | 300.000 | Beli |
| 16 | Sepeda motor | unit | 15.000.000 | 2 | 2 | - | - | BPBD |
| 17 | Air Mineral | kardus | 20.000 | - | 100 | 100 | 2.000.000 | Beli |
| 18 | Konsumsi petugas | orang/90hr | 4.500.000 | - | 30 | 30 | 135.000.000 | |
| 19 | Honor petugas posko | orang/90hr | 4.500.000 | - | 30 | 30 | 135.000.000 | |
| 20 | Rain coat/ponco | stel | 150.000 | - | 30 | 30 | 4.500.000 | Beli |
| Jumlah | | | | | | | 284.500.000 | |

KLASTER PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KOORDINATOR : BASARNAS – SAR KOTA PADANG

A. SITUASI

Apabila terjadi tsunami di Sumatera Barat, yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,9 SR, maka daerah-daerah pada 7 kabupaten / kota yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia akan terkena dampak. Pada aspek kehidupan berdasarkan data BPS Sumbar (2011) terdapat 921.349 jiwa terancam bencana tsunami. Sebanyak 259.009 jiwa meninggal, 92.135 jiwa hilang. Lalu 560.992 orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di antara para pengungsi terdapat 62.007 korban luka ringan, korban luka sedang sebanyak 56.099 dan luka berat sebanyak 224.397. Untuk korban non-rawatan berjumlah 218.488 jiwa.

Untuk meminimalisir jatuhnya korban lebih besar perlu segera dilakukan suatu tindakan berupa pengerahan personil dan peralatan serta pendukung lainnya secara optimal untuk melakukan pencarian dan pertolongan korban selamat. Secara bersamaan, perlu juga dilakukan penyelenggaraan korban meninggal yang dibantu oleh masyarakat dan tokoh agama setempat agar jasad korban dapat diselenggarakan secara layak sesuai dengan keyakinan dan norma berlaku.

B. SASARAN

1. Tersedianya jalur evakuasi
2. Terlaksananya proses pencarian dan evakuasi korban bencana termasuk penyelenggaraan jenazah
3. Tersedia dan dilakukannya pertolongan segera kepada korban yang cedera
4. Antisipasi agar tidak bertambahnya korban serta prioritas pelayanan dan perlindungan terhadap kelompok rentan (anak-anak, wanita, lansia dan kelompok berkebutuhan khusus)
5. Identifikasi korban

C. KEGIATAN

Pada kluster Manajemen dan Koordinasi kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

Tabel 16. Kegiatan Kluster Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi

| NO. | KEGIATAN | PELAKU | PJ | WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|--|--|------------------|----------------------------------|
| 1. | Koordinator kluster membagi zona/wilayah pencarian dan evakuasi korban | BASARNAS, BPBD, TNI, Polda Sumbar, | BASARNAS dan TNI | 1x24 jam setelah bencana terjadi |
| 2. | Menyediakan peralatan dan membuka jalur evakuasi untuk pencarian korban | PMI, OS OCC, NGO, Dinkes, Tagana, Satpol PP dan Linmas | BPBD Sumbar | 1x24 jam setelah bencana terjadi |
| 3. | Memberikan pengarahan kepada masyarakat pada saat melakukan pengamanan zona pencarian korban | | TNI | 3x24 jam setelah bencana terjadi |

| NO. | KEGIATAN | PELAKU | PJ | WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|--|---|---------------------|--|
| 4. | Melakukan evakuasi dan penyelamatan terhadap korban yang cedera | BASARNAS, BPBD, TNI, Polda Sumbar, PMI, OS OCC, NGO, Dinkes, Tagana, Satpol PP dan Linmas | BASARNAS | 1x24 jam hingga 7 hari (standar SAR) setelah bencana terjadi |
| 5. | Melakukan pemilahan (<i>triage</i>) terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau RS dan pertolongan pertama di lokasi bencana | | BASARNAS dan Dinkes | 1x24 jam hingga 7 hari (standar SAR) setelah bencana terjadi |
| 6. | Mengirim korban bencana yang selamat ke RS/Puskesmas/pos kesehatan terdekat | | BASARNAS | 1x24 jam hingga 7 hari (standar SAR) setelah bencana terjadi |
| 7. | Melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil <i>triage</i> | | Dinkes | 1x24 jam hingga 7 hari (standar SAR) setelah bencana terjadi |
| 8. | Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam proses penyelamatan dan pertolongan korban bencana | | BASARNAS | 1x24 jam hingga 7 hari (standar SAR) setelah bencana terjadi |
| 9. | Pemakaman bagi korban yang meninggal | | BASARNAS | 1-7 hari setelah bencana terjadi |
| 10. | Melakukan pendataan dan identifikasi korban yang hidup dan meninggal | | TNI-Polri (DVI) | 1-7 hari setelah bencana terjadi |
| 11. | Melaporkan hasil identifikasi kepada posko | | TNI - Polri | 1-7 hari setelah bencana terjadi |
| 12. | Membuat informasi dan publikasi data korban | | BASARNAS | 1-7 hari setelah bencana terjadi |

D. PROYEKSI KEBUTUHAN

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh klaster Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka diproyeksikan jumlah biaya untuk klaster ini sebesar **Rp. 164.269.080.000,-** (seratus enam puluh empat milyar, dua ratus enam puluh Sembilan juta, delapan puluh ribu Rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya.

Menurut prosedur operasi SAR, proses pencarian dan evakuasi korban biasanya dilakukan selama 7 hari setelah bencana terjadi dan bisa diperpanjang sesuai dengan situasi yang ditemui di lapangan. Maksimal dilaksanakan selama 14 hari, sesuai dengan batas kemampuan manusia bertahan hidup tanpa air dan makanan.

Proyeksi kebutuhan untuk klaster Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi dapat dilihat tabel 17.

Tabel 17. Kebutuhan Klaster Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi

| No | Jenis kebutuhan | Merk | Satuan | Harga satuan | Jumlah | | | Jumlah | Ket |
|----------|---|------------------|--------|----------------|----------|-----------|-------------|----------------|-----|
| | | | | | Tersedia | Kebutuhan | Kesenjangan | | |
| I | ALAT UTAMA SAR | | | | | | | | |
| A | SARANA ANGKUTAN SAR DARAT | | | | | | | | |
| 1 | RESCUE CAR | ISUZU | UNIT | 300.000.000 | 2 | 6 | 4 | 1.200.000.000 | |
| 2 | RESCUE CAR + PAL SAR DARAT | ISUZU | UNIT | 800.000.000 | 1 | 3 | 2 | 1.600.000.000 | |
| 3 | ATV HEAVY DUTY | POLARIS | UNIT | 350.000.000 | 1 | 4 | 3 | 1.050.000.000 | |
| 4 | RESCUE TRUCK + PALSAR DARAT/AIR | ISUZU | UNIT | 980.000.000 | 1 | 4 | 3 | 2.940.000.000 | |
| 5 | TRUCK ANGKUT PERSONIL | ISUZU | UNIT | 350.000.000 | 1 | 5 | 4 | 1.400.000.000 | |
| 6 | AMBULANCE RESCUE | MITSUBISHI | UNIT | 200.000.000 | 1 | 4 | 3 | 600.000.000 | |
| 7 | SEPEDA MOTOR TRAIL | KAWASAKI | UNIT | 20.000.000 | 4 | 10 | 6 | 120.000.000 | |
| B | SARANA SAR ANGKUTAN LAUT | | | | | | | | |
| 1 | RESCUE BOAT KELAS II (30 s/d 40 M) | RB 213 PADANG 01 | UNIT | 30.000.000.000 | 1 | 4 | 3 | 90.000.000.000 | |
| 2 | RIGID INFLATABLE BOAT 9,0 M | GEMINI | UNIT | 1.000.000.000 | 1 | 6 | 5 | 5.000.000.000 | |
| 3 | SPEED BOAT+LIFEJACKET+MESIN PK+HELM | AVON | UNIT | 90.000.000 | 6 | 10 | 4 | 360.000.000 | |
| 4 | PERAHU KARET+DAYUNG+LIFEJACKET+HELM | BOOGIE | UNIT | 60.000.000 | 2 | 10 | 8 | 480.000.000 | |
| C | PERALATAN PENDUKUNG UTAMA | | | | | | | | |
| 1 | MOUNTENERING | PETZL | SET | 95.000.000 | 3 | 10 | 7 | 665.000.000 | |
| 2 | HIDROLIK RESCUE TOOLS | - | SET | 140.000.000 | 1 | 10 | 9 | 1.260.000.000 | |
| 3 | PALSAR MEDIS | - | SET | 100.000.000 | 1 | 4 | 3 | 300.000.000 | |
| 4 | PALSAR AIR | DACOR | SET | 30.000.000 | 5 | 10 | 5 | 150.000.000 | |
| 5 | PERALATAN PENDETEKSI LOKASI KORBAN RERUNTUHAN | NOMAD | UNIT | 180.000.000 | 1 | 10 | 9 | 1.620.000.000 | |
| 6 | SOUND DETECTOR | DELSAR | UNIT | 122.000.000 | 1 | 10 | 9 | 1.098.000.000 | |
| 7 | TELESCOPIK DAN PERLENGKAPANNYA | SEARCHCAM | UNIT | 135.000.000 | 1 | 10 | 9 | 1.215.000.000 | |
| 8 | BREACHING SISTYM | LC | UNIT | 42.000.000 | 1 | 10 | 9 | 378.000.000 | |

| No | Jenis kebutuhan | Merk | Satuan | Harga satuan | Jumlah | | | Jumlah | Ket |
|---------------|------------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|------------------------|-----|
| | | | | | Tersedia | Kebutuhan | Kesenjangan | | |
| 9 | SOLAR CELL UNIT | - | UNIT | 27.000.000 | 1 | 5 | 4 | 108.000.000 | |
| 10 | PENYARING AIR | - | UNIT | 85.000.000 | 1 | 5 | 4 | 340.000.000 | |
| 11 | ALKOM VERSI HANDY TALKIE | MOTOROLA | BUAH | 1.800.000 | 8 | 30 | 22 | 39.600.000 | |
| 12 | HALF DOME HELMET+HEAD LAMP | BLACK DIAMOND | BUAH | 3.000.000 | 8 | 100 | 92 | 276.000.000 | |
| 13 | SAFETY GOOGLE | RUDI PROJEKT | BUAH | 250.000 | 8 | 100 | 92 | 23.000.000 | |
| 14 | HALF MASK | STANDART | BUAH | 200.000 | 8 | 100 | 92 | 18.400.000 | |
| 15 | SAFETY SHOES | DR OSHA | PSG | 890.000 | 8 | 100 | 92 | 81.880.000 | |
| 16 | SHOES BOOT | KING's | PSG | 150.000 | 8 | 100 | 92 | 13.800.000 | |
| 17 | KNEE PAD & ELBOW PAD | FOX | PSG | 300.000 | 8 | 100 | 92 | 27.600.000 | |
| 18 | BINOCULAR | - | Buah | 1.500.000 | 3 | 5 | 2 | 3.000.000 | |
| 19 | KANTONG MAYAT | LOKAL | Buah | 200.000 | 24 | 259009 | 258985 | 51.797.000.000 | |
| II | ALAT BANTU NAVIGASI SAR | | | | | | | | |
| 1 | GLOBAL POSITIONARY STATIONARY/ GPS | - | SET | 3.000.000 | 1 | 5 | 4 | 12.000.000 | |
| 2 | KOMPAS | - | SET | 150.000 | 10 | 12 | 2 | 300.000 | |
| III | ALAT ANGKUT UDARA | | | | | | | | |
| 1 | HELI RESCUE | - | UNIT | - | - | 2 | 2 | | |
| IV | PERSONIL | | | | | | | | |
| | HONOR PETUGAS / 90 HR | | ORANG | 50.000 | | 1850 | 1850 | 92.500.000 | |
| JUMLAH | | | | | | | | 164.269.080.000 | |

A. SITUASI

Apabila terjadi tsunami berkekuatan 8,9 SR maka akan banyak korban berjatuhan karena tertimpa reruntuhan bangunan, karena kecelakaan kendaraan bermotor dan juga hanyut terbawa gelombang tsunami. Pada aspek kehidupan berdasarkan data BPS Sumbar (2011) terdapat 921.349 jiwa terancam bencana tsunami. Sebanyak 259.009 jiwa meninggal, 92.135 jiwa hilang. Lalu 560.992 orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di antara para pengungsi terdapat 62.007 korban luka ringan, korban luka sedang sebanyak 56.099 dan luka berat sebanyak 224.397. Untuk korban non-rawatan berjumlah 218.488 jiwa.

Selain perlu bantuan pertolongan dan pengobatan medis, para pengungsi (korban bencana) juga perlu mendapatkan bantuan *trauma relief*. Maka, tim kesehatan yang bergabung dalam klaster kesehatan harus bergerak cepat untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa lebih banyak dan memberikan pertolongan kepada korban luka ringan dengan segera agar dapat membantu korban lainnya di barak penampungan. Selain itu perlu dilakukan antisipasi untuk penyakit menular seperti penyakit kulit, flu dan batuk. Korban-korban luka berat perlu segera ditangani di rumah sakit yang masih berfungsi atau rumah sakit darurat.

B. SASARAN

1. Tersedianya Sumber Daya Kesehatan dan relawan medis yang memadai secara kualitas dan kuantitas
2. Berfungsinya seluruh sarana dan prasarana kesehatan yang ada (termasuk Rumah Sakit dan puskesmas), RS Darurat serta RS Lapangan
3. Tersedianya obat-obatan dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan
4. Teridentifikasinya jenazah yang ditemukan oleh Tim *Disaster Victim Identification* (DVI)
5. Terhindarnya pengungsi dan petugas dari ancaman penyakit akibat dampak bencana yang terjadi serta terpeliharanya kesehatan lingkungan dan sanitasi
6. Terjangkaunya sasaran pelayanan kesehatan ke daerah sulit/terpencil
7. Antisipasi gangguan kesehatan jiwa/mental/psikologis masyarakat
8. Tersedianya data korban yang dapat dipertanggungjawabkan

C. KEGIATAN

Kegiatan klaster kesehatan menjadi bagian penting dari proses penanganan darurat bencana terutama pertolongan bagi korban yang selamat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh klaster ini antara lain:

Tabel 18. Kegiatan Klaster Kesehatan

| No | Kegiatan | Pelaku | PJ | Waktu Pelaksanaan |
|-----|--|--|---------------------|--|
| 1. | Kajian cepat | TNI, Polda Sumbar, Bappeda, Dinas PU Basarnas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dishub dan Kominfo, , PMI, OS, OCC, NGO, PDAM, PLN | DINKES | 1-6 jam setelah bencana terjadi |
| 2. | Mendirikan pos kesehatan dan RS Lapangan | | DINKES | 1X24 jam setelah bencana terjadi |
| 3. | Mengerahkan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi | | DINKES | 1X24 jam setelah bencana terjadi atau setelah ditetapkannya satu darurat bencana |
| 4. | Pemenuhan peralatan/perlengkapan kesehatan berdasarkan jenis kejadian | | DINKES, BPBD SUMBAR | 1X24 jam setelah bencana terjadi atau setelah ditetapkannya satu darurat bencana |
| 5. | Segera melakukan <i>Rapid Health Assesment</i> | | DINKES | 1X24 jam setelah bencana terjadi atau setelah ditetapkannya satu darurat bencana |
| 6. | Dropping obat dan peralatan <i>buffer stocks</i> sesuai kejadian | | DINKES | 1X24 jam setelah bencana terjadi atau setelah ditetapkannya satu darurat bencana |
| 7. | Melakukan triage (pemilahan korban) | | TNI-Polri, DINKES | 1-7 hari setelah terjadinya bencana |
| 8. | Melakukan pelayanan kesehatan keliling | | DINKES | 1-7 hari setelah terjadinya bencana |
| 9. | Segera menurunkan petugas surveilance | | BPBD Sumbar, DINKES | 1-7 hari setelah terjadinya bencana |
| 10. | Menyiapkan petugas promosi kesehatan | | DINKES | 1-7 hari setelah terjadinya bencana |
| 11. | Menyiapkan kegiatan trauma healing dan pedampingan terhadap masyarakat | | DINKES | 1-7 hari setelah terjadinya bencana |
| 12. | Data korban <i>by name by address</i> berdasarkan status rawatan korban | | DINKES | 1-7 hari setelah terjadinya bencana |
| 13. | Diperolehnya data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang korban, dsb | | DINKES | 1-7 hari setelah terjadinya bencana |

D. STANDAR MINIMAL

1. Pelayanan kesehatan umum meliputi :
 - Pelayanan kesehatan dasar
 - Pelayanan kesehatan klinis

2. Pengendalian penyakit menular meliputi :
 - Pencegahan Umum
 - Pencegahan Campak
 - Diagnosis dan Pengelolaan Kasus
 - Kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa
 - Deteksi KLB, Penyelidikan & Tanggap
 - HIV/AIDS

3. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :
 - Cedera
 - Kesehatan Reproduksi
 - Aspek Kejiwaan dan Sosial Kesehatan
 - Penyakit Kronis

E. PROYEKSI KEBUTUHAN

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh klaster Kesehatan, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka diproyeksikan jumlah biaya untuk klaster ini sebesar **Rp. 942.105.960.000,-** (Sembilan ratus empat puluh dua milyar, seratus lima juta, sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya.

Proyeksi kebutuhan untuk klaster Kesehatan dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Kebutuhan Klaster Kesehatan

| No | Jenis kebutuhan | Standar | | | Volume | Hari | Harga satuan | Kebutuhan | Ketersediaan | | Kesenjangan | Jumlah |
|----|--------------------------|---------|------|-------|---------|------|---------------|------------|--------------|----------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Kab/kota | Provinsi | | |
| 1 | Obat & bahan habis pakai | 30% | per | orang | 266.324 | 90 | 15.000 | 7.190.748 | 47.938 | 7.990 | 7.134.820 | 107.022.300.000 |
| 2 | Obat Spesialis | 10% | per | orang | 266.324 | 90 | 40.000 | 2.396.916 | 15.979 | 1.332 | 2.379.605 | 95.184.200.000 |
| 3 | Tabung Oksigen | 4 | per | posko | 138 | | 1.750.000 | 552 | 360 | 4 | 188 | 329.000.000 |
| 4 | Darah | 2 | per | orang | 10.000 | 90 | 300.000 | 1.800.000 | 12.000 | 0 | 1.788.000 | 536.400.000.000 |
| 5 | Isi Ulang Tabung Oksigen | 4 | per | posko | 138 | 90 | 55.000 | 49.680 | 360 | 0 | 49.320 | 2.712.600.000 |
| 6 | Infus Lengkap | 5 | per | posko | 138 | 90 | 35.000 | 62.100 | 300 | 150 | 61.650 | 2.157.750.000 |
| 7 | Cairan Infus | 300 | per | posko | 138 | 90 | 20.000 | 3.726.000 | 18.000 | 9.000 | 3.699.000 | 73.980.000.000 |
| 8 | Alat Suntik Disposable | 500 | per | posko | 138 | 90 | 7.500 | 6.210.000 | 30.000 | 20.000 | 6.160.000 | 46.200.000.000 |
| 9 | Stetoscope | 2 | per | posko | 138 | | 250.000 | 276 | 120 | 50 | 106 | 26.500.000 |
| 10 | Tensimeter | 2 | per | posko | 138 | | 850.000 | 276 | 120 | 50 | 106 | 90.100.000 |
| 11 | Minor Surgery | 1 | per | posko | 138 | | 250.000 | 138 | 60 | 20 | 58 | 14.500.000 |
| 12 | Surgery Mobile | 1 | unit | | 3 | | 1.000.000.000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.000.000.000 |
| 13 | Ambulance/Puskel | 1 | per | posko | 138 | | 250.000.000 | 138 | 100 | 3 | 35 | 8.750.000.000 |
| 15 | Sepatu Bot | 2 | per | posko | 138 | | 50.000 | 276 | 120 | 40 | 116 | 5.800.000 |
| 16 | Jas Hujan | 2 | per | posko | 138 | | 50.000 | 276 | 120 | 40 | 116 | 5.800.000 |
| 17 | Tengki Air | 1 | per | posko | 138 | | 500.000 | 138 | 60 | 0 | 78 | 39.000.000 |
| 18 | Vel bed | 2 | per | posko | 138 | | 150.000 | 276 | 120 | 100 | 56 | 8.400.000 |
| 19 | Genset | 1 | per | posko | 138 | | 7.500.000 | 138 | 37 | 3 | 98 | 735.000.000 |
| 20 | Tikar | 4 | per | posko | 138 | | 35.000 | 552 | 240 | 0 | 312 | 10.920.000 |
| 21 | Masker | 50 | per | posko | 138 | 90 | 2.500 | 621.000 | 3.000 | 100 | 617.900 | 1.544.750.000 |
| 22 | Sarung Tangan | 1000 | per | posko | 138 | 90 | 5.000 | 12.420.000 | 60.000 | 1.000 | 12.359.000 | 61.795.000.000 |
| 23 | Senter | 2 | per | posko | 138 | | 60.000 | 276 | 120 | 40 | 116 | 6.960.000 |
| 24 | Tandu | 2 | per | posko | 138 | | 550.000 | 276 | 120 | 3 | 153 | 84.150.000 |
| 25 | Handy Talky | 1 | per | posko | 138 | | 2.500.000 | 138 | 37 | 15 | 86 | 215.000.000 |
| 27 | Kotak P3K lengkap | 1 | per | posko | 138 | | 80.000 | 138 | 37 | 1 | 100 | 8.000.000 |
| 28 | Racun Api | 1 | per | posko | 138 | | 1.500.000 | 138 | 37 | 0 | 101 | 151.500.000 |

| No | Jenis kebutuhan | Standar | | | Volume | Hari | Harga satuan | Kebutuhan | Ketersediaan | | Kesenjangan | Jumlah |
|---------------|------------------------|---------|-----|-----------|--------|------|--------------|-----------|--------------|----------|------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | Kab/kota | Provinsi | | |
| 29 | Papan Data | 1 | per | posko | 138 | | 500.000 | 138 | 37 | 0 | 101 | 50.500.000 |
| 30 | Peta | 1 | per | posko | 138 | | 200.000 | 138 | 37 | 0 | 101 | 20.200.000 |
| 31 | Lemari Peralatan Medis | 1 | per | posko | 138 | | 2.500.000 | 138 | 37 | 0 | 101 | 252.500.000 |
| 32 | ATK | 1 | per | posko | 138 | | 875.000 | 138 | 37 | 0 | 101 | 88.375.000 |
| 33 | BBM | 50 | per | ambulance | 30 | 90 | 4.500 | 135.000 | 900 | 0 | 134.100 | 603.450.000 |
| 34 | Kantong Mayat | 1877 | per | posko | 138 | | 200.000 | 259.026 | 4200 | 254.826 | 0 | 0 |
| 35 | Sepeda Motor | 1 | per | posko | 138 | | 14.000.000 | 138 | 37 | 0 | 101 | 1.414.000.000 |
| 36 | Filling Cabinet | 1 | per | posko | 138 | | 1.500.000 | 138 | 37 | 0 | 101 | 151.500.000 |
| 37 | Tenaga Supir | 1 | per | posko | 138 | | 50.000 | 138 | 37 | 0 | 101 | 5.050.000 |
| 38 | Tim Gerak Cepat | 1 | per | posko | 138 | | 100.000 | 138 | 37 | 0 | 101 | 10.100.000 |
| 39 | Dr. Umum | 1 | per | posko | 138 | | 100.000 | 138 | 75 | 7 | 56 | 5.600.000 |
| 40 | Dr. Bedah (Transport) | 6 | per | provinsi | 15 | | 100.000 | 90 | 3 | 3 | 84 | 8.400.000 |
| 41 | Perawat/Bidan | 2 | per | posko | 138 | | 75.000 | 276 | 200 | 7 | 69 | 5.175.000 |
| 42 | Sanitarian | 1 | per | posko | 138 | | 50.000 | 138 | 100 | 10 | 28 | 1.400.000 |
| 43 | Ahli Gizi | 1 | per | posko | 138 | | 100.000 | 138 | 100 | 10 | 28 | 2.800.000 |
| 44 | Relawan PMI | 2 | per | posko | 138 | | 40.000 | 276 | 100 | 10 | 166 | 6.640.000 |
| 45 | Pramuka SBH | 2 | per | posko | 138 | | 40.000 | 276 | 200 | 0 | 76 | 3.040.000 |
| 46 | Psikolog | 7 | per | provinsi | 7 | | 100.000 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 47 | Psikiater | 7 | per | provinsi | 7 | | 100.000 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | | | | | | | | | 942.105.960.000 | |

A. SITUASI

Apabila terjadi tsunami yang dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 8,9 SR maka gelombang akan melanda daratan sejauh 3 km dan ketinggian maksimum 12 meter dari permukaan laut. Keadaan ini akan mengakibatkan beberapa ruas jalan terputus dan dikhawatirkan jalan penghubung antar Kabupaten dan Kota sepanjang pesisir pantai mengalami kerusakan parah. Begitupun dengan jaringan informasi komunikasi akan mengalami gangguan, telepon rumah mengalami putus jaringan sementara provider selular mengalami *traffic* yang sangat tinggi sehingga tidak bisa difungsikan. Maka, perlu diupayakan perbaikan dan pengadaan sarana transportasi, informasi dan komunikasi agar kebutuhan selama masa penanganan darurat bencana bisa terpenuhi terutama untuk pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar.

B. TUJUAN

1. Meminimalisir jumlah korban jiwa
2. Penyelamatan segera korban luka berat, ringan dan mengungsi yang ada di bawa ke Rumah Sakit maupun posko kesehatan yang ada di wilayah bencana
3. Adanya jalur distribusi logistik (bantuan) dan evakuasi bagi korban (masyarakat) di wilayah bencana
4. Adanya pembagian area atau wilayah operasi dan penanggung jawab
5. Klaster, instansi dan pihak terkait penanggulangan bencana dapat melakukan komunikasi segera yang berhubungan dengan tanggap darurat bencana
6. Memudahkan pengumpulan dan penyampaian informasi tentang bencana yang terjadi
7. Adanya data akurat yang seragam dan diakses oleh siapa saja (utamanya masyarakat, pemerintah dan media massa).

C. SASARAN

1. Terpenuhinya kebutuhan alat komunikasi (telepon satelit, HT, dsb) untuk digunakan oleh seluruh unsur pimpinan tanggap darurat hingga tim pelaksana kegiatan seluruh klaster serta berfungsinya jaringan komunikasi secara baik dan merata yang dapat menghubungkan antara provinsi dengan kab/kota dan pusat.
2. Tersedianya personil dan teknisi yang dapat menggunakan alat komunikasi pada masing-masing instansi/SKPD terkait penanggulangan bencana dan pada tiap Klaster.
3. Tersedia dan berfungsinya *media centre* untuk penerimaan dan penyampaian informasi. Informasi harus bersifat satu pintu.
4. Terpenuhinya sarana prasarana transportasi (darat, laut dan udara) serta data yang lengkap, berupa alat angkut dan sarana angkut, jalan dan personil (pengemudi) yang dibutuhkan dalam kegiatan tanggap darurat.

D. KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh kluster transportasi, informasi dan komunikasi antara lain:

Tabel 20. Kegiatan Kluster Transportasi, Informasi dan Komunikasi

| NO | KEGIATAN | PELAKU | PJ | WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|---|--|--------------------------|---|
| 1. | Kajian cepat dan mendirikan posko kluster transportasi, informasi dan komunikasi | BPBD Sumbar, Dishub Kominfo, Dinas Sosial, PU, Pertamina, RRI dan media massa lainnya, ESDM, Biro Umum, PLN RAPI, PDAM, Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, TELKOM, Bulog, ORARI, Provider Selular, Satpol PP dan Linmas, Disperindag, BUMN/BUMS, | DISHUB DAN KOMINFO | 1x24 jam setelah bencana terjadi |
| 2. | Mendata jenis dan jumlah kebutuhan alat komunikasi yang akan digunakan pada saat kegiatan tanggap darurat bencana | | DISHUB & KOMINFO | 1x24 jam setelah bencana terjadi |
| 3. | Menyusun dan menetapkan call sign dan sandi komunikasi untuk semua tim kluster penanganan darurat bencana | | DISHUB & KOMINFO | 1x24 jam setelah bencana terjadi |
| 4. | Menyiapkan personil dan teknisi yang ahli dalam penggunaan masing-masing jenis alat komunikasi | | DISHUB & KOMINFO | 1x24 jam setelah bencana terjadi |
| 5. | Menyiapkan suku cadang untuk masing-masing alat komunikasi | | DISHUB & KOMINFO | 1x24 jam setelah bencana terjadi |
| 6. | Menyediakan ruangan media centre | | BPBD SUMBAR | 1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan |
| 7. | Menyusun dan mengatur tugas personil yang ada di media centre | | BPBD SUMBAR | 1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan |
| 8. | Menyiapkan data (akurat) yang akan dipublikasikan | | BPBD SUMBAR | 1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan |
| 9. | Melakukan koordinasi dengan instansi/SKPD lain dalam hal penyediaan sarana transportasi | | BPBD SUMBAR | 1x24 jam setelah bencana terjadi |
| 10. | Meyiapkan personil dan sarana transportasi serta bahan bakar, oli, suku cadang masing-masing jenis alat transportasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana | | BPBD SUMBAR, TNI - POLRI | 1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan |
| 11. | Mengatur lalu lintas | | DISHUB & | 1x24 jam setelah |

| NO | KEGIATAN | PELAKU | PJ | WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|---|--------|-----------------------|---|
| | transportasi darat, laut dan udara | | KOMINFO, TNI | bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan |
| 12. | Mencari alternatif landasan pacu darurat untuk pesawat udara/ helipad | | DISHUB & KOMINFO, TNI | 1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan |
| 13. | Menyediakan titik-titik pendaratan helipad | | DISHUB & KOMINFO, TNI | 1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan |
| 14. | Membangun jembatan darurat agar akses ke dan menuju lokasi bencana atau tempat pengungsian dapat dijangkau (dilewati) | | DISHUB & KOMINFO, TNI | 1x24 jam setelah bencana terjadi atau setelah status tanggap darurat ditetapkan |

E. PROYEKSI KEBUTUHAN

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh klaster Transportasi, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka diproyeksikan jumlah biaya untuk klaster ini sebesar **Rp. 942.105.960.000,-** (Sembilan ratus empat puluh dua milyar, seratus lima juta, sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya.

Proyeksi kebutuhan untuk klaster Transportasi, Informasi dan Komunikasi lebih detail dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21. Kebutuhan Klaster Transportasi, Informasi dan Komunikasi

| No | Jenis dan kebutuhan | Satuan | Harga satuan | Jumlah | | | Jumlah | Ket |
|----|----------------------------|--------|--------------|----------|-----------|------------|-------------|------|
| | | | | Tersedia | Kebutuhan | Kekurangan | | |
| 1 | SSB TRANSCEIVER | unit | 100.000.000 | 1 | 2 | 1 | 100.000.000 | BELI |
| 2 | VHF TRANSCEIVER | unit | 95.000.000 | 1 | 4 | 3 | 285.000.000 | BELI |
| 3 | UHF TRANSCEIVER | unit | 1.500.000 | 1 | 4 | 3 | 4.500.000 | BELI |
| 4 | SIRINE | unit | 150.000 | 0 | 2 | 2 | 300.000 | BELI |
| 5 | GPS TRACKING | unit | 10.000.000 | 1 | 4 | 3 | 30.000.000 | BELI |
| 6 | COMANDO CRASH CAR | unit | 150.000.000 | 0 | 1 | 1 | 150.000.000 | BELI |
| 7 | AMBULANCE | unit | 150.000.000 | 1 | 2 | 1 | 150.000.000 | BELI |
| 8 | REPEATER | unit | 6.000.000 | 0 | 2 | 2 | 12.000.000 | BELI |
| 9 | MOBILE ATC EQUIPMENT | unit | 25.000.000 | 0 | 1 | 1 | 25.000.000 | BELI |
| 10 | FIRE EXTINGUISHER 9 kg | unit | 750.000 | 0 | 10 | 10 | 7.500.000 | BELI |
| 11 | MOBIL TANGKI AFTUR | unit | 4.500.000 | 0 | 2 | 2 | 9.000.000 | SEWA |
| 12 | BIAYA TRANSPORTASI PETUGAS | unit | 300.000 | 0 | 150 | 150 | 45.000.000 | |
| 13 | RADIO ALL BAND* | unit | 8.000.000 | 1 | 4 | 3 | 24.000.000 | BELI |
| 14 | MEGAPHONE* | unit | 600.000 | 2 | 10 | 8 | 4.800.000 | BELI |
| 15 | TV* | unit | 2.500.000 | 0 | 4 | 4 | 10.000.000 | BELI |
| 16 | CAMERA* | unit | 4.000.000 | 0 | 2 | 2 | 8.000.000 | BELI |
| 17 | HANDYCAM* | unit | 10.000.000 | 0 | 2 | 2 | 20.000.000 | BELI |
| 18 | COMPRESOR | unit | 9.000.000 | 0 | 5 | 5 | 45.000.000 | BELI |
| 19 | BATTERAY 12VOLT | unit | 600.000 | 0 | 20 | 20 | 12.000.000 | BELI |
| 20 | SENER* | unit | 40.000 | 0 | 40 | 40 | 1.600.000 | BELI |
| 21 | TELPON SATELIT* | unit | 15.000.000 | 0 | 4 | 4 | 60.000.000 | BELI |
| 22 | SEPEDA MOTOR* | unit | 15.000.000 | 1 | 4 | 3 | 45.000.000 | BELI |

| No | Jenis dan kebutuhan | Satuan | Harga satuan | Jumlah | | | Jumlah | Ket |
|----|--------------------------------|--------|--------------|----------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | | Tersedia | Kebutuhan | Kekurangan | | |
| 23 | FORKLIFT 4 TON | unit | 4.500.000 | 1 | 2 | 1 | 4.500.000 | SEWA |
| 24 | FORKLIFT 10 TON | unit | 5.500.000 | 0 | 2 | 2 | 11.000.000 | SEWA |
| 25 | TROLLY | unit | 750.000 | 20 | 40 | 20 | 15.000.000 | BELI |
| 26 | BINOCULAR | unit | 300.000 | 1 | 2 | 1 | 300.000 | BELI |
| 27 | ROTATING BEACON PORTABLE | unit | 3.500.000 | 0 | 1 | 1 | 3.500.000 | BELI |
| 28 | LIGHT SIGNAL LAMP (AC/DC) | unit | 2.500.000 | 0 | 1 | 1 | 2.500.000 | BELI |
| 29 | HAND METAL DETECTOR | unit | 25.500.000 | 0 | 2 | 2 | 51.000.000 | BELI |
| 30 | FAXIMILI | unit | 2.500.000 | 0 | 2 | 2 | 5.000.000 | BELI |
| 31 | COMPUTER LAPTOP & FAS INTERNET | unit | 10.000.000 | 0 | 4 | 4 | 40.000.000 | BELI |
| 32 | KERETA DORONG SAMPAH | unit | 750.000 | 0 | 20 | 20 | 15.000.000 | BELI |
| 33 | TRACKTOR | unit | 4.500.000 | 0 | 2 | 2 | 9.000.000 | SEWA |
| 34 | ESCAFATOR | unit | 5.500.000 | 0 | 4 | 4 | 22.000.000 | SEWA |
| 35 | MOBIL DEREK | unit | 1.500.000 | 0 | 4 | 4 | 6.000.000 | SEWA |
| 36 | MOBIL TRUK SAMPAH (UNLOAD OTM) | unit | 1.500.000 | 0 | 10 | 10 | 15.000.000 | SEWA |
| 37 | TRUCK KECIL (PICK UP) | unit | 1.000.000 | 0 | 10 | 10 | 10.000.000 | SEWA |
| 38 | TRUCK MENENGAH | unit | 1.250.000 | 0 | 6 | 6 | 7.500.000 | SEWA |
| 39 | TRUCK BESAR | unit | 2.500.000 | 0 | 20 | 20 | 50.000.000 | SEWA |
| 40 | BUS KECIL (ANGKOT) | unit | 1.000.000 | 0 | 10 | 10 | 10.000.000 | SEWA |
| 41 | BUS MENENGAH | unit | 2.500.000 | 0 | 20 | 20 | 50.000.000 | SEWA |
| 42 | BUS BESAR | unit | 3.000.000 | 0 | 20 | 20 | 60.000.000 | SEWA |
| 43 | HELICOPTER | unit | USD 3000/JAM | 0 | 4 | 4 | 405.000.000 | 5 JAM/Hari |
| 44 | PESAWAT AMPHIBI | unit | USD 2200/JAM | 0 | 2 | 2 | 297.000.000 | 5 JAM/Hari |
| 45 | PESAWAT KECIL (16 SEAT) | unit | USD 2000/JAM | 0 | 2 | 2 | 270.000.000 | 5 JAM/Hari |
| 46 | PESAWAT MENENGAH (50 SEAT) | unit | USD 1750/JAM | 0 | 2 | 2 | 236.250.000 | 5 JAM/Hari |

| No | Jenis dan kebutuhan | Satuan | Harga satuan | Jumlah | | | Jumlah | Ket |
|---------------|----------------------|--------|--------------|----------|-----------|------------|----------------------|------------|
| | | | | Tersedia | Kebutuhan | Kekurangan | | |
| 47 | HERCULES | unit | USD 500/JAM | 0 | 1 | 1 | 67.500.000 | 5 JAM/Hari |
| 48 | BBM AVTUR | Liter | 3.500 | 0 | 100.000 | 100000 | 350.000.000 | BELI |
| 49 | BBM BENSIN | Liter | 4.500 | 0 | 200.000 | 200000 | 900.000.000 | BELI |
| 50 | HONOR PETUGAS PATWAL | orang | 300.000 | 0 | 50 | 50 | 15.000.000 | |
| 51 | OLIE | Liter | 1.500 | 0 | 100.000 | 100000 | 150.000.000 | BELI |
| 52 | KAPAL KECIL 30 DWT | unit | 15.000.000 | 0 | 2 | 2 | 30.000.000 | SEWA |
| 53 | KAPAL CEPAT | unit | 30.000.000 | 0 | 2 | 2 | 60.000.000 | SEWA |
| 54 | KAPAL KRI | unit | 20.000.000 | 0 | 1 | 1 | 20.000.000 | SEWA |
| 55 | WIND SHOCK | unit | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 2.500.000 | BELI |
| JUMLAH | | | | | | | 4.239.250.000 | |

**KLASTER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA
DARURAT
KOORDINATOR : DINAS PRASJALTARKIM**

A. SITUASI

Apabila terjadi tsunami yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,9 SR maka fasilitas kritis, fasilitas umum, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan/perekonomian akan terkena dampak, selain kerusakan oleh getaran gempa, juga kerusakan yang disebabkan oleh landaan tsunami. Kerusakan fasilitas umum dan fasilitas kritis harus segera ditangani. Diketahui data kerusakan fasilitas umum adalah sebagai berikut : gedung pemerintahan di daerah terancam akan mengalami rusak sedang 20 %, berat 70 %, 10 %. sekolah mengalami rusak berat sebanyak 80 %, ringan 5 %, sedang 15 %. Pasar tradisional rusak ringan 5 %, rusak sedang 10%, rusak berat 85 %.

Begitu pula halnya dengan fasilitas kritis yang mengalami kerusakan. Dari data unsur terancam; jalan dan jembatan mengalami kerusakan, sebanyak 80 % mengalami kerusakan parah, 10 % sedang dan 10 % rusak ringan. Sebanyak 85 % jaringan listrik rusak parah (putus), 10 % rusak sedang, dan 5 % rusak ringan. Jaringan air bersih, 80 % rusak ringan, 10 % sedang dan 10 % lainnya rusak berat. Untuk Bahan Bakar Minyak, baik kilang minyak maupun SPBU yang ada juga mengalami kerusakan akibat tsunami. Kerusakan yang dialami mencapai 100% dari 80% depot terancam.

Sarana pelayanan kesehatan, seperti Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Rumah Bersalin, dll ikut mengalami kerusakan. Dari 40% yang terancam, sebanyak 80 % rusak berat, 10 % rusak sedang dan juga ringan. Kerusakan saluran komunikasi menimbulkan dampak yang besar di masyarakat dan instansi pemerintahan yang ada. Jaringan dan sinyal telekomunikasi terputus. Data kerusakan, sebanyak 85 % rusak berat, 10 rusak sedang dan 5 % mengalami kerusakan ringan. Dan bandara sebagai salah satu fasilitas kritis juga mengalami kerusakan. Tiga bandara yang ada : Bandara International Minangkabau (BIM), Bandara Pangkalan Udara (Lanud) dan Bandara Rokot (Mentawai) terancam landaan; 30% rusak parah, 0 % rusak sedang dan 70 % lainnya rusak ringan. Sedangkan sarana pelabuhan mengalami kerusakan parah, yaitu 100 %.

B. SASARAN

1. Fasilitas umum yang terkait dengan kebutuhan hajat hidup masyarakat dapat kembali berfungsi secara baik serta kembali pulihnya sarana jalan kab/kota/provinsi
2. Pelayanan publik, pendidikan dan lembaga/instansi pemerintahan dapat kembali berfungsi (tidak vakum)

C. KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh klaster perbaikan dan pemulihan sarana prasarana darurat antara lain:

Tabel 22. Kegiatan Klaster Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana Darurat

| NO | KEGIATAN | PELAKU | PJ | WAKTU PELAKSANAAN |
|----|--|--|----------------------------------|--|
| 1. | Kajian cepat dan mendirikan posko kluster pemulihan dan perbaikan sarana prasarana darurat | Dinas Prasjaltarkim, BPBD Sumbar, PSDA, Bappeda, TNI, Polri, PDAM, Dinkes, ESDM, | DINAS PRASJALTARKIM | 1x24 jam setelah bencana terjadi |
| 2. | Melaksanakan rapat koordinasi terpadu untuk pendataan terhadap fasilitas umum dan pelayanan publik yang rusak akibat bencana tsunami | PLN, OS OCC, DISHUB Bappedalda, KOMINFO | BPBD Sumbar | 1x24 jam setelah bencana terjadi |
| 3. | Menyusun skala prioritas kegiatan untuk pemulihan dan perbaikan sarana prasarana darurat secara cepat dan tepat | | BPBD Sumbar | 1x24 jam setelah status tanggap darurat ditetapkan (1-7 hari setelah tanggap darurat bencana ditetapkan) |
| 4. | Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan klaster terkait | | BPBD Sumbar | 1x24 jam setelah bencana terjadi dan setelah status tanggap darurat ditetapkan |
| 5. | Mengatasi atau menanggulangi sarana prasarana penting yang dibutuhkan oleh masing-masing dinas atau instansi terkait | | TNI - Polri | 1x24 jam setelah status tanggap darurat ditetapkan (1-7 hari setelah tanggap darurat bencana ditetapkan) |
| 6. | Melakukan perbaikan jalan menuju titik-titik yang terkena bencana | | TNI - Polri, DINAS PRASJALTARKIM | 1x24 jam setelah status tanggap darurat ditetapkan (1-7 hari setelah tanggap darurat bencana ditetapkan) |

D. STANDAR MINIMAL

1. 1 Tenda Rumah Sakit untuk 2500 orang
2. 1 Tenda Pengungsi untuk 25 orang
3. 1 Tenda Sekolah untuk 40 orang
4. 1 Tenda Dapur Umum untuk 100 orang
5. Sumber Listrik GENSET
6. 1 MCK untuk 20 orang

E. PROYEKSI KEBUTUHAN

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh klaster Perbaikan dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Darurat, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka diproyeksikan kebutuhan biaya untuk klaster ini sebesar **Rp. 69.796.296.000,-** (Enam puluh sembilan milyar, tujuh ratus sembilan puluh enam juta, dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya. Proyeksi kebutuhan untuk klaster Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana Darurat lebih detail dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 23. Kebutuhan Klaster Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana Darurat

| No | Jenis kebutuhan | Jumlah | | | Harga satuan | Jumlah | Keterangan |
|---------------|---------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| | | Tersedia | Kebutuhan | Kesenjangan | | | |
| 1 | Panel Jembatan Bailey (m) | 135 | 1.095 | 960 | 16.000.000 | 15.360.000.000 | dibangun |
| 2 | Helikopter | 7 | 7 | - | | | TNI/POLRI/SAR |
| 3 | Escavator | 35 | 74 | 39 | 350.000 | 13.650.000 | PU (3) - Sewa/Jam |
| 4 | Loader | 14 | 37 | 23 | 400.000 | 9.200.000 | PU (4) - Sewa/Jam |
| 5 | Grader | 10 | 19 | 9 | 500.000 | 4.500.000 | PU (3) - Sewa/Jam |
| 6 | Dump Truck | 7 | 37 | 30 | 266.000 | 7.980.000 | sewa/jam |
| 8 | IPA Mobile | 14 | 90 | 76 | 200.000 | 15.200.000 | sewa/jam |
| 9 | Tangki Air 1000L | 55 | 560 | 505 | 750.000 | 378.750.000 | beli |
| 10 | Mobil Mini Bus | 14 | 14 | - | | - | Dinsos, MUSPIDA |
| 11 | Tenda Rumah Sakit | 26 | 138 | 112 | | - | Dinkes/TNI/POLRI |
| 12 | Tenda Sekolah | 80 | 224 | 144 | | - | Dinsos/Diknas |
| 13 | Tenda Dapur Umum | 13 | 561 | 548 | | - | Dinsos/TNI/POLRI |
| 14 | MCK | - | 28.050 | 28.050 | 2.000.000 | 56.099.200.000 | dibangun |
| 15 | Penyaring Air | - | 90 | 90 | 4.000.000 | 360.000.000 | beli |
| 16 | Air Bersih | - | 516.673.632 | 516.673.632 | | - | |
| 17 | Jerigen Air | - | 112198 | 112.198 | 35.000 | 3.926.944.000 | beli |
| 18 | Alat Penerangan (set) | - | 112198 | 112.198 | 30.000 | 3.365.952.000 | beli |
| 19 | Tempat Sampah | - | 56.099 | 56.099 | 100.000 | 5.609.920.000 | beli |
| 20 | Honor Personil | - | 100 | 100 | 50.000 | 5.000.000 | Honor |
| Jumlah | | | | | | 69.796.296.000 | |

KLASTER LOGISTIK, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KOORDINATOR : DINAS SOSIAL

A. SITUASI

Apabila terjadi bencana tsunami yang dipicu oleh gempa berkekuatan 8,9 SR, maka 7 kabupaten/kota yang terkena dampak akan membutuhkan bantuan dari luar. Baik dari kabupaten/kota lain yang tak terkena dampak, dari provinsi lain, dari pusat atau bahkan dari dunia internasional. Bantuan ini baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar maupun untuk kebutuhan lainnya seperti: bantuan jaringan komunikasi, bantuan tenaga SAR, semuanya akan dikoordinir oleh klaster Logistik, penerimaan dan penyaluran bantuan. Adapun asumsi pengungsi bencana tsunami yaitu sebanyak 560.992 jiwa. Para pengungsi merupakan masyarakat sipil yang selamat dari bencana tsunami. Meskipun banyak di antaranya yang mengalami luka-luka.

Mereka terdiri dari berbagai usia dan latar belakang kehidupan. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, dosen, guru, pedagang, anak-anak, dan sebagainya. Oleh sebab itu bantuan berupa kebutuhan logistik (sandang, pangan, papan) sangat diperlukan. Selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar, menjaga kesehatan para pengungsi, perlu juga diperhatikan perlindungan berbasis gender. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tidak saja untuk korban yang mengungsi tapi juga untuk seluruh personil yang terlibat dalam penanganan darurat sesuai dengan asumsi jumlah kebutuhan personil dari evaluasi harian.

B. SASARAN

1. Terpenuhinya dukungan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tanggap darurat terpenuhi
2. Tersedianya personil, saran dan prasarana yang dibutuhkan dalam penerimaan dan penyaluran bantuan
3. Tersedianya mekanisme kerja yang baik, teratur dan terarah, yaitu tersedianya pemetaan kebutuhan dan pendistribusian bantuan
4. Terdatanya jumlah, jenis, dan asal bantuan yang diterima oleh instansi/SKPD dan klaster
5. Terpenuhi dan tersalurkannya kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi masyarakat di wilayah bencana secara cepat, tepat dan merata sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan

C. KEGIATAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh klaster logistik, penerimaan dan penyaluran bantuan antara lain:

Tabel 24. Kegiatan Klaster Logistik, Penerimaan dan Penyaluran Bantuan

| NO | KEGIATAN | PELAKU | PJ | WAKTU PELAKSANAAN |
|----|---|---|--------------|----------------------------------|
| 1. | Kajian cepat dan mendirikan posko klaster logistik, penerimaan dan penyaluran bantuan | BPBD Sumbar, TNI Polri, Dinas Sosial, Bappeda | DINAS SOSIAL | 1x24 jam setelah bencana terjadi |

| NO | KEGIATAN | PELAKU | PJ | WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|--|---|-----------------------------------|--|
| 2. | Melaksanakan rapat koordinasi terpadu untuk pendataan personil, jenis dan jumlah logistik yang dibutuhkan oleh masing-masing klaster | Pol PP, BPKP, Dinkes, Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina, Bank Indonesia | BPBD SUMBAR | 1x24 jam setelah bencana terjadi |
| 3. | Mengorganisir pemenuhan kebutuhan masing-masing klaster | | DINAS SOSIAL | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 4. | Menyiapkan dan menyalurkan kebutuhan logistik yang diperlukan oleh masing-masing klaster dan wilayah bencana | | DINAS SOSIAL | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 5. | Menyediakan personil (bongkar muat dan penyaluran) bantuan sesuai dengan kebutuhan klaster | | TNI - Polri | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 6. | Membagi, mengkoordinir dan mengontrol tugas masing-masing personil yang ada | | TNI - Polri | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 7. | Menyediakan personil atau relawan yang membantu dalam penerjemahan nama dan jenis bantuan yang diterima dari luar negeri | | DINAS SOSIAL | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 8. | Mencatat dan mengklasifikasikan semua bantuan yang diterima oleh klaster | | DINAS SOSIAL | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 9. | Mengetahui kronologis penyaluran bantuan kepada korban bencana (masyarakat di lokasi bencana) | | DINAS SOSIAL | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 10. | Melakukan pencatatan bantuan berupa uang oleh pihak keuangan (bank) yang terkait | | BANK INDONESIA A dan DINAS SOSIAL | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 11. | Melakukan pendataan dan penyortiran/pemilihan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana | | DINAS SOSIAL | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 12. | Menyelenggarakan kegiatan dapur umum di tempat-tempat pengungsian | | TNI - POLRI dan SATPOL PP | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 13. | Menyediakan gudang untuk penyimpanan bantuan | | BPBD SUMBAR | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 14. | Melakukan koordinasi dengan klaster lainnya | | BPBD SUMBAR | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 15. | Menyelenggarakan administrasi penerimaan dan penyaluran bantuan | | DINAS SOSIAL | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 16. | Menugaskan personil yang tersedia untuk bekerja sesuai dengan tugas yang mereka miliki masing-masing | | TNI - POLRI | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 17. | Menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi | | TNI - POLRI dan | 1x24 jam setelah status darurat |

| NO | KEGIATAN | PELAKU | PJ | WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|--|--------|-----------------|--|
| | bencana secara cepat dan tepat | | SATPOL PP | bencana ditetapkan |
| 18. | Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan penyaluran bantuan kepada korban bencana | | BPBD SUMBAR | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |
| 19. | Memenuhi dan menyalurkan bantuan berupa kebutuhan sandang dan pangan masyarakat di wilayah bencana secara cepat, tepat dan merata sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan | | DINAS SOSIAL | 1x24 jam setelah status darurat bencana ditetapkan |

D. STANDAR MINIMAL

1. Bantuan Pangan

- Bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk.
- Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari.
- Besarnya bantuan makanan (poin a dan b) setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).

2. Bantuan Non-Pangan

- Peralatan memasak dan makan
- Kompor, Bahan Bakar, dan Penerangan
- Alat-alat dan Perkakas

3. Bantuan Sandang

- Perlengkapan pribadi
- Kebersihan Pribadi

4. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

- Bantuan air bersih
 - Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari.
 - Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan risiko kesehatan.
- Bantuan Sanitasi
 - Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara.
 - Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan.
 - Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang.
 - Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurang-kurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah.
 - Dasar penampung kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga
 - Tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya.
 - Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

E. KEBUTUHAN

Berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh klaster Logistik, Penerimaan dan Penyaluran Bantuan, jumlah personil dan peralatan yang dibutuhkan, maka diproyeksikan kebutuhan biaya untuk klaster ini sebesar **Rp. 2.470.610.077.600,-** (Dua trilyun, empat ratus tujuh puluh milyar, enam ratus sepuluh juta, tujuh puluh tujuh ribu, enam ratus Rupiah) dalam menjalankan operasi daruratnya. Proyeksi kebutuhan untuk klaster Logistik, Penerimaan dan Penyaluran Bantuan dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25. Kebutuhan Klaster Logistik, Penerimaan dan Penyaluran Bantuan

| No | Jenis kebutuhan | Satuan | Standar | Volume | Jumlah | | | Harga Satuan | Jumlah | Keterangan |
|---------------|--------------------------|-----------------|---------|---------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | Persediaan | Kebutuhan | Kekurangan | | | |
| 1 | Pakaian | Stel | 2 | 560.992 | 1.000 | 1.121.984 | 1.120.984 | 50.000 | 56.049.200.000 | |
| 2 | Selimut | Lembar | 1 | 560.992 | 1.000 | 560.992 | 559.992 | 25.000 | 13.999.800.000 | |
| 3 | Beras | hari/gr/org | 400 | 577.896 | 900.000 | 20.804.256.000 | 20.803.356.000 | 15 | 312.050.340.000 | |
| 4 | Lauk Pauk | hari/paket/org | 1 | 577.896 | 20.869 | 52.010.640 | 51.989.771 | 8.000 | 415.918.168.000 | |
| 5 | M.Tanah | liter/90hr/KK | 50 | 112.198 | 1.000 | 5.609.920 | 5.608.920 | 7.500 | 42.066.900.000 | |
| 7 | tenda keluarga | kk/unit | 1 | 112.198 | 50 | 112.198 | 112.148 | 2.500.000 | 280.371.000.000 | |
| 8 | Genset 5000 watt | unit/kota/kab | 5 | 7 | 35 | 35 | - | 12.000.000 | - | PMI, BPBD, Dinsos |
| 9 | Tikar | org/lembar | 1 | 560.992 | 1.000 | 560.992 | 559.992 | 25.000 | 13.999.800.000 | |
| 11 | Family Kit | kk/paket/30hr | 1 | 112.198 | 1.000 | 10.097.856 | 10.096.856 | 130.000 | 1.312.591.280.000 | |
| 13 | Food ware | kk/paket/30hr | 1 | 112.198 | 1.000 | 112.198 | 111.198 | 200.000 | 22.239.680.000 | |
| 15 | Kid Ware | bayi/paket/90hr | 1 | 57.790 | 5.779 | 57.790 | 52.011 | 20.000 | 1.040.212.800 | |
| 14 | Pembalut Wanita | lembar/org/30hr | 2 | 224.397 | 1.000 | 448.794 | 447.794 | 500 | 223.896.800 | |
| 15 | Honor Petugas Dapur Umum | org/Dapur umum | 2 | 561 | 1.122 | 1.122 | - | 50.000 | 56.100.000 | |
| 16 | Honor Petugas Penyaluran | org | | | 74 | 74 | - | 50.000 | 3.700.000 | |
| Jumlah | | | | | | | | | 2.470.610.077.600 | |

REKAPITULASI KEBUTUHAN

Jika terjadi bencana tsunami dengan skenario gempa 8,9 SR seperti dijelaskan pada BAB 2, maka dana atau anggaran yang dibutuhkan sebesar **Rp. 3.651.305.163.600,- (tiga trilyun, enam ratus lima puluh satu milyar, tiga ratus lima juta, seratus enam puluh tiga ribu, enam ratus Rupiah)** seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 26. Rekapitulasi Kebutuhan

| NO | KLASTER | SATUAN | KEBUTUHAN |
|---------------|--|--------|--------------------------|
| 1. | Manajemen dan Koordinasi | Hari | 284.500.000 |
| 2. | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi | Hari | 164.269.080.000 |
| 3. | Kesehatan | Hari | 942.105.960.000 |
| 4. | Transportasi, Informasi dan Komunikasi | Hari | 4.239.250.000 |
| 5. | Perbaikan dan Pemulihan Sarana Prasarana Darurat | Hari | 69.796.296.000 |
| 6. | Logistik, Penerimaan dan Penyaluran Bantuan | Hari | 2.470.610.077.600 |
| JUMLAH | | | 3.651.305.163.600 |

7

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Rencana Kontinjensi ini disusun bersama oleh Dinas/Intansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana di Provinsi Sumatera Barat merujuk kepada situasi dan kondisi bencana gempa bumi 30 September 2009 lalu.
2. Dalam rangka mengamankan stok pangan, obat-obatan, bantuan untuk korban bencana alam tsunami kiranya dapat membangun gudang penampungan di tempat-tempat ketinggian yang dianggap aman dari ancaman bencana tsunami.
3. Pada masa yang akan datang menerapkan pemberian IMB baru dapat lebih difokuskan dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan :
 - Posisi bangunan
 - Lokasi bangunan
 - Konstruksi bangunan tahan gempa
 - Jarak lantai bangunan
 - Tata ruang Kota
 - Dan lain-lain
4. Perlu dialokasikan dana tak terduga di masing-masing klaster untuk membiayai hal-hal yang tak terduga diluar perkiran sebelumnya.
5. Setiap masyarakat korban bencana yang memperoleh bantuan tidak dikenakan pajak.
6. Penanggulangan bencana biaya Operasional saat tanggap darurat terlebih dahulu dapat dimanfaatkan dana SKPD masing-masing.
7. Pemerintah Daerah berkewajiban membuat syarat-syarat bangunan yang aman terhadap bencana gempa pada saat pengurusan IMB bagi yang akan membangun
8. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan infrastruktur pendukung evakuasi bagi masyarakat seperti : jalan evakuasi, shelter, bukit buatan untuk evakuasi, dll Pemerintah Daerah berkewajiban menghilangkan/meniadakan gangguan yang pada jalur evakuasi seperti billboard ditengah jalan

9. Pemerintah membuat peraturan bagi pemilik bangunan yang tinggi untuk membuka akses bagi masyarakat sebagai tempat evakuasi vertical
10. Perlunya meningkatkan kesiapsiagaan pada masa yang akan datang dengan dilakukan kegiatan :
 - Melakukan dan melanjutkan edukasi, pelatihan dan pendampingan tentang kesiapsiagaan kepada masyarakat untuk mendukung respon peringatan dini. Terutama bagi masyarakat pinggir pantai
 - Komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana
 - Informasi berkelanjutan di instansi masing-masing sehingga kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan tanggap darurat bisa terus dikawal dan berkelanjutan
 - Sistem peringatan dini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas personil dan sarana prasarana Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops)
11. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas Bangunan yang memiliki fasilitas helipad untuk dapat dimanfaatkan pada saat terjadi bencana.

Rencana kontinjensi dan prosedur operasi standar harus diteruskan dan disinkronisasi dengan kabupaten dan kota di Sumatera Barat.



PENUTUP

Demikian Rencana Kontinjensi ini dibuat sebagai bahan masukan bagi Bapak Gubernur Sumatera Barat dan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan lebih lanjut. Jumlah anggaran biaya yang ditimbulkan dari beberapa Klaster dalam penanganan bencana bukanlah sebagai Daftar Isian Kegiatan tetapi adalah Proyeksi Kebutuhan apabila terjadi bencana. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga, instansi-instansi vertikal, lembaga-lembaga swasta, masyarakat, relawan dan lain-lain.

Kami menyadari bahwa rencana kontinjensi ini masih perlu penyempurnaan dan review secara berkala untuk mengaktualkan data yang ada .

Padang, 25 Januari 2012

LAMPIRAN

Lampiran 1.

PARAMETER PENGHENTIAN STATUS TANGGAP DARURAT

Dalam rangka penanganan darurat bencana utamanya terhadap korban akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi, maka perlu diambil beberapa kebijakan agar semua korban dapat segera tertolong dan berbagai fasilitas serta infrastruktur dapat diperbaiki. Sehingga nantinya semua aktifitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. Namun karena belum ada ketetapan pemerintah (Perpres) dalam hal kebijakan lama masa tanggap darurat dan penghentian status tanggap darurat, maka terlebih dahulu perlu kiranya kita susun parameter untuk penghentian status tanggap darurat bencana. Dalam hal ini patokan atau rujukan yang digunakan berdasarkan Perka BNPB Nomor 11 tahun 2010.

Berikut merupakan beberapa parameter pengakhiran status tanggap darurat yang secara spesifik merujuk pada telah pulihnya fungsi unsur-unsur atau aspek-aspek yang terkena dampak bencana, yaitu sebagai berikut :

Tabel 27. Parameter Pengakhiran Status Darurat Bencana

| No. | Aspek/Unsur yang Terkena Dampak | Parameter |
|-----|----------------------------------|--|
| 1. | KEHIDUPAN | |
| | Masyarakat/ penduduk | Seluruh jenazah yang telah ditemukan sudah dimakamkan |
| | | Pencarian korban sudah dihentikan (melalui prosedur operasi SAR) |
| | | Kebutuhan dasar sudah bisa dipenuhi (berdasarkan Perka No. 11/2008) |
| | | Sudah tersedia huntara |
| 2. | FASILITAS UMUM | |
| | Jalan dan jembatan | Jalan dan jembatan menuju dan pada lokasi bencana sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda empat (4) |
| | Jaringan listrik | Pulihnya pasokan listrik untuk sarana dan prasarana minimal untuk fasilitas pelayanan publik dan aktifitas perekonomian (objek vital dan proyek vital); rumah sakit, gedung pemerintah, posko darurat, tempat pengungsian) |
| | Jaringan air bersih dan sanitasi | Pulihnya pasokan air bersih dan sanitasi minimal untuk korban bencana |
| | Bahan Bakar Minyak (BBM) | Pasokan BBM untuk penanggulangan bencana terpenuhi |
| | Sarana pelayanan kesehatan | Pertolongan darurat untuk korban sudah dilakukan |
| | | Sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya telah aktif di tiap kecamatan (baik posko darurat ataupun puskesmas) |
| | Saluran komunikasi | Jaringan komunikasi institusi pemerintah dan pelayanan publik sudah pulih |
| | | Jaringan komunikasi sebagian provider sudah pulih |
| | | Komunikasi antar posko tanggap darurat bencana kabupaten/kota dengan provinsi dan dengan BNPB sudah lancar |
| | Bandara | Terlaksananya Penyaluran bantuan melalui udara |
| | Pelabuhan | Terlaksananya Penyaluran bantuan melalui laut |
| 3. | FASILITAS UMUM | |
| | Kantor pemerintahan | Aktifitas pemerintahan telah berjalan dengan baik |

| No. | Aspek/Unsur yang Terkena Dampak | Parameter |
|-----|---------------------------------|--|
| | | Layanan publik telah membaik |
| | Pasar tradisional | Pasokan kebutuhan pokok telah mulai lancar |
| | | Aktifitas jual beli telah mulai lancar |
| | Sekolah | Telah tersedia sekolah-sekolah darurat |
| | | Aktifitas belajar mengajar sudah mulai dilakukan |

PROFIL INSTANSI KELOMPOK KERJA(POKJA)

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|---|
| 1. NAMA LEMBAGA | BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/ FAX/EMAIL | JL. SUDIRMAN 47 PADANG |
| 3. KONTAK PERSON | <ul style="list-style-type: none"> • Ir. ROSE YARDI • SYAMSUL BAHRI • DODI Y |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | <ul style="list-style-type: none"> • KASI KESIAPSIAGAAN 081363413860 • STAF BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN 08136350357 • STAF BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN 085274684190 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DAN BERPERAN DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | MELAKUKAN KOMANDO DAN KOORDINASI UNTUK PEMBAGIAN TUGAS SEMUA KLASTER (KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI, KLASTER PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI, KLASTER KESEHATAN, KLASTER TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI, KLASTER PERBAIKAN, PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT, DAN KLASTER LOGISTIC, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN) |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | <ul style="list-style-type: none"> - PERSONIL 56 ORANG - PRASARANA <ul style="list-style-type: none"> • GEDUNG KANTOR BPBD.PROV • GEDUNG PUSDALOPS – PB - SARANA MOBIL RESCUE, MOBIL AMBULANCE, MOBIL DAPUR UMUM, DLL |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. KHATIB SULAIMAN NO. 48 PADANG 0751 - 442158 sumbar@bps.go.id |
| 3. KONTAK PERSON | JUBAEDI |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | KEPALA SEKSI IPD 081374283901 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | a. MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SENSUS PENDUDUK b. MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SURVEI TERTENTU c. DISEMINASI DATA MAKRO |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. KAJIAN CEPAT (KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI) b. KLASTER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT c. KLASTER LOGISTIK, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | - PERSONIL - PRASARANA - SARANA |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | PALANG MERAH INDONESIA (PMI) PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. SISIMANGARAJA NO. 34 PADANG 0751-28718 pmi_sumbar@yahoo.com |
| 3. KONTAK PERSON | ZULHENDRI |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | KEPALA DIVISI PENANGGULANGAN BENCANA 081374693707 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | a. PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK b. TRANSFUSI DARAH c. KESIAPSIAGAAN |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI b. KLASTER PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI c. KLASTER KESEHATAN |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | <ul style="list-style-type: none"> - PERSONIL <li style="padding-left: 20px;">Jumlah total 2010 <li style="padding-left: 20px;">Tenaga medis 110 <li style="padding-left: 20px;">SAR 1800 <li style="padding-left: 20px;">Logistik/DU 10 <li style="padding-left: 20px;">Posko 90 - PRASARANA - SARANA |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | PT. PLN (PERSERO) WILAYAH BARAT |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. DR. WAHIDIN NO.8 PADANG 0751 – 33446/ 0751 – 36880 |
| 3. KONTAK PERSON | EFFENDI/ SYAFRIL ABAS |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | ENGINEER LINGKUNGAN PK2 081363183696 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | PERUSAHAAN TENAGA LISTRIK |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | - PERSONIL - PRASARANA - SARANA GENERATOR MOBILE |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.65 A 0751 – 26484 Irwandiwalis1962@yahoo.com |
| 3. KONTAK PERSON | IRWANDI WALIS |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | KOORD. KOMUNIKASI, INFORMASI DATA PB 08126759043 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS BIDANG KESEHATAN PADA SAAT TERJADI BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. KOORDINATOR KLASTER KESEHATAN b. KLASTER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA DARURAT c. KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | - PERSONIL - PRASARANA - SARANA |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|--|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | KOREM 032/WBR TNI-AD |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. SUDIRMAN NO.29 PADANG 0751 – 34155 brambaramuli@yahoo.com |
| 3. KONTAK PERSON | BARAMULI |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | PASILAT SIOPSREM 081386634888 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | MEMBANTU PEMDA DALAM MENGATASI BENCANA ALAM |
| 6.TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. SEBAGAI PASUKAN PRC PB b. MELAKSANAKAN EVAKUASI c. MENYELENGGARAKAN POSKO d. MENYELENGGARAKAN DAPUR LAPANGAN e. MELAKSANAKAN RUMKIT LAPANGAN |
| a. WILAYAH CAKUPAN | SESUMATERA BARAT |
| b. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | - PERSONIL 2 BATALYON PRC PB - PRASARANA RUMAH SAKIT TENTARA - SARANA <ul style="list-style-type: none"> • PERALATAN POSKO – RUMAH SAKIT LAPANGAN • KENDARAAN • DAPUR LAPANGAN |
| c. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|---|
| 1. NAMA LEMBAGA | DINAS PERHUBUNGAN & KOMINFO |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. RADEN SALEH 12 PADANG 0751 – 40331/ 0751 – 40332 |
| 3. KONTAK PERSON | HERRY ZULMAN |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | KABID PHB UDARA DISHUB 08126613422 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | FUNGSI PEMERINTAHAN PADA: <ul style="list-style-type: none"> - MODA TRANS DARAT - MODA TRANS LAUT - MODA TRANS UDARA - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI b. KLASTER TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | <ul style="list-style-type: none"> - PERSONIL <ul style="list-style-type: none"> • DARAT : 600 ORANG • LAUT : 400 ORANG • UDARA : 200 ORANG • INFOKOM : 250 ORANG - PRASARANA <ul style="list-style-type: none"> • JALAN & JEMBATAN : 6.750 km • PELABUHAN LAUT : 14 BUAH • BANDARA : 3 BUAH • TOWER BTS : 310 BUAH - SARANA <ul style="list-style-type: none"> • MODA DARAT : kira-kira 350 TRUK • MODA LAUT : 23 BUAH • MODA UDARA : - • ALAT KOMUNIKASI VHF, SSB, UHF |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | SATPOL PP PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. DURI I NO.1/ BERSEBELAHAN DENGAN KANTOR METROLOGI KOPERINDAG PROV-SUMBAR 0751 – 29675/ 0751-29675 |
| 3. KONTAK PERSON | DESDULFIKAR |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | KASI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN OPS 081266653112 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | a. PENGAWALAN & PENGAMANAN KEPALA DAERAH & WAKIL DAERAH KE TEMPAT-TEMPAT PENTING b. PEMELIHARAAN TRANTIBUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT c. PENEGAKKAN PERDA d. MEMBANTU KEGIATAN PAM ACARA PEMDA |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. MEMBANTU AKTIFASI KEGIATAN BIDANG OPS KETIKA TERJADI BENCANA (BEKERJASAMA DENGAN BPBD) b. MEMBANTU DALAM EVAKUASI KORBAN BENCANA c. MEMBANTU OPS BANTUAN BENCANA |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | - PERSONIL <ul style="list-style-type: none"> • Lebih Kurang 1.067 ORANG (MEMBANTU EVAKUASI MANUSIA, MEMBAWA BARANG BANTUAN, PAM-WAL WALGUB, WABUP, PEJABAT) - PRASARANA <ul style="list-style-type: none"> • 1 UNIT MOBIL PATROLI • 1 UNIT OPS LAPANGAN • 2 UNIT KENDARAAN PATWAL RODA DUA - SARANA <ul style="list-style-type: none"> • KANTOR PUSAT SATPOL PP POSKO INDUK • POS-POS PENGAMANAN |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | - MEMBANTU TUGAS LAIN TENAGA SAR-OPS PENYELAMATAN AIR - KETERAMPILAN PEMASANGAN TENDA-TENDA WAKTU EVAKUASI KORBAN |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|---|
| 1. NAMA LEMBAGA | PUSAT STUDI BENCANA UNAND |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | UNIVERSITAS ANDALAS, LIMAU MANIS PADANG |
| 3. KONTAK PERSON | FUAD TASMAN |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | STAF 085274533008 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | a. KAJIAN CEPAT b. ANALISIS DAERAH RAWAN BENCANA |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | KLASTER TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | KOTA PADANG |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | KANTOR SAR PADANG |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. BY PASS KM 25 BATI PURI PANJANG – PADANG 0751 – 484534 |
| 3. KONTAK PERSON | AKMAL |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | STAF RESCUER 081266212272 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | MENCARI DAN MENYELAMATKAN JIWA ORANG YANG HILANG ATAU DIKHAWATIRKAN HILANG DALAM MUSIBAH PENERBANGAN, PELAYARAN, BENCANA ALAM DAN MUSIBAH LAINNYA. |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | KLASTER PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | PROVINSI SUMATERA BARAT DAN BENGKULU |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | 1. RESCUER 2. PERAWAT 3 orang 3. ABK KAPAL |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | PDAM KOTA PADANG |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. AGUS SALIM NO. 10 0751 – 23743/ 0751 – 30460 |
| 3. KONTAK PERSON | AFRIZAL |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | PELAKSANA PEMUTUSAN 0751 – 9001979/ 081266617799 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | a. PEMUTUSAN b. AIR TIDAK JALAN c. MEMPERBAIKI PIPA BOCOR |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. KLAS TER MANAJEMEN DAN KOORDINASI b. KLAS TER KESEHATAN c. KLAS TER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA DARURAT |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | WILAYAH SELATAN |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|---|
| 1. NAMA LEMBAGA | LPP RRI PADANG |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. SUDIRMAN No.12 0751 812007/ 0751 21643 |
| 3. KONTAK PERSON | REFRISON, SE |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | KEPALA SUB SEKSI PENGEMBANGAN BERITA 081374840446 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | A. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK B. MENYEBARKAN INFORMASI C. MENYELENGGARAKAN SIARAN |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. MENYEBARKAN INFORMASI, MEMBANTU SOSIALISASI, SEBAGAI PUSAT INFORMASI b. KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI c. KLASTER TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | - PERALATAN SIARAN DAN KOMUNIKASI LENGKAP - STUDIO SIARAN SIAGA BENCANA DI GUNUNG SARIAK |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | POLDA SUMBAR |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. SUDIRMAN NO.55 0751 38110 OPS_DASUMBAR@YAHOO.COM |
| 3. KONTAK PERSON | AKBP Z.DT. MARAJO |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | KABAGDALOPS BIRO OPS POLDA SUMBAR 081374277777 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | A. MELAKSANAKAN SISLAPHAR GKTM B. MENGUMPUL, MENGOLAH, DAN SAJIKAN DATA C. PENGENDALIAN OPERASI |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | A. PENGATURAN, MENGGERAKKAN SUMBER DAYA UNTUK PAM, SAR, DVI DAN PELAPORAN B. BERPERAN DI SEMUA KLASTER. KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI, PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI, KESEHATAN, TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI, PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT, DAN KLASTER LOGISTIK, PENERIMAAN DAN PENYALURAN BANTUAN |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | - SAR DARAT, AIR - PAM, WAL, TUR, PATROLI - TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - TENAGA MEDIS - RUMAH SAKIT - ALAT TRANSPORTASI |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|---|
| 1. NAMA LEMBAGA | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. JHONI ANWAR NO. 85 LAPAI (0751) 54487/ (0751) 51445 |
| 3. KONTAK PERSON | RUSNOVIANDI, ST |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | STAF MITIGASI BENCANA GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN 081394956711 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | a. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DATA MITIGASI BENCANA GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN b. MELAKSANAKAN FASILITAS, PELAKSANA USAHA MITIGASI c. BENCANA GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN d. MELAKSANAKAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN SEKSI MITIGASI BENCANA GEOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. DETEKSI DINI (KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI b. KLASTER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA DARURAT (SPBU) |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | - PERSONIL : 15 ORANG - SARANA : - PRASARANA : 1. PETA GEOLOGI 2. PETA GERAKAN TANAH 3. PETA LANDAAN TSUNAMI 4. PETA KRB GUNUNG API 5. ALAT KOMUNIKASI - RADIO RIG - HT |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA SUMATERA BARAT |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KANTOR BPBD LT. 3 |
| 3. KONTAK PERSON | ARDIZAL SASTRA |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | ANGGOTA BIDANG PARTISIPASI DAN PELEMBAGAAN 081266835353 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN KOORDINASI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PRB |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. KLASER MANAJEMEN DAN KOORDINASI b. KLASER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA DARURAT |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|---|
| 1. NAMA LEMBAGA | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 52 PADANG 0751 – 21955/ 0751-27510 |
| 3. KONTAK PERSON | LIZA MARHAINI DAN YULIMAR |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | STAF SUBAG PROGRAM 0811663888/ 081363532502 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | A. TUPIM MENYUSUN RENCANA PROGRAM B. TUPIM MELAKUKAN PENDATAAN C. TUPIM PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI D. TUPIM PENYUSUNAN LAKM |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. KLASTER TRANSPORTASI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI b. KLASTER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA DARURAT |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PEMUKIMAN PROV. SUMATERA BARAT (DINAS PRASJALTARKIM) |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. TAMAN SISWA NO. 1 PADANG |
| 3. KONTAK PERSON | ADRIANSYAH |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | STAF BID. PERALATAN 081363435228 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Dinas bidang perlatan b. Membantu Dinas menunjang kinerja dinas c. Mempersiapkan perlatan siap pakai d. Membantu penanggulangan bencana |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | KLASTER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA PRASARANA DARURAT (Menyediakan/mempersiapkan peralatan/alat berat dan Menyediakan/menyiapkan jembatan darurat) |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | <ul style="list-style-type: none"> - PERALATAN/ ALAT BERAT EXCAVATOR 3 unit WHEEL LOADER 3 unit MOTOR GRADER 2 unit DUMP TRUCK 6 unit - JEMBATAN PANEL BENTANG 30 m 4 unit - JEMBATAN BALLEY sekitar 15 m - PERSONIL sekitar 350 orang |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|---|
| 1. NAMA LEMBAGA | BAPPEDA (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH) PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. KHATIB SULAIMAN NO.25 PADANG (0751) 54555 – 7055254/ (0751) 443611 |
| 3. KONTAK PERSON | HAMDI IRZA |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | STAF BID. PENGEMBANGAN WILAYAH X LINGKUNGAN HIDUP 085265069538 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | Membantu dalam penilaian kerusakan kantor pemerintahan |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. KLASER MANAJEMEN DAN KOORDINASI b. KLASER KESEHATAN c. KLASER PERBAIKAN DAN PEMULIHAN SARANA DAN PRASARANA |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | - Jumlah SDM 20 orang |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|---|
| 1. NAMA LEMBAGA | PANGKALAN TNI – AU |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. PROF. HAMKA NO. 1 PADANG |
| 3. KONTAK PERSON | KURNIAWAN S, ST |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | KEPALA DINAS OPERASI 081394337274 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi, mengawasi dan kendali operasi b. Koordinasi, mengawasi dan kendali penerbangan c. Koordinasi, mengawasi dan kendali hankam d. Koordinasi, mengawasi dan kendali potdirja |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | <p>Berperan di semua klaster (klaster manajemen dan koordinasi, klaster pencarian, pertolongan dan evakuasi, klaster kesehatan, klaster transportasi, informasi dan komunikasi, klaster perbaikan, pemulihan sarana prasarana darurat, dan klaster logistic, penerimaan dan penyaluran bantuan)</p> <p>Perannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan/ membantu giat penerbangan b. Mempersiapkan/ membantu lapangan terbang c. Membantu instansi terkait penerbangan |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas penerbangan Tower Runway - Personel sekitar 150 orang |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. KOTO TINGGI NO. 9 PADANG 33288 |
| 3. KONTAK PERSON | EFENDI |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | Staf KP3KP 081363707060 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | Staf pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | KLASTER MANAJEMEN DAN KOORDINASI (Menyediakan alat berat dan bantuan SDM) |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | - Peralatan alat berat 1. Excavator 1 unit 2. Mobil mini bus 10 unit - Personil 200 orang |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|--|
| 1. NAMA LEMBAGA | DINAS SOSIAL PROV. SUMATERA BARAT |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. KHATIB SULAIMAN NO. 5 PADANG |
| 3. KONTAK PERSON | Drs. BURHANUDDIN |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | PENYULUH SOSIAL MUDA 085364549947 |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | a. Mendeskripsikan daerah rawan social b. Merancang program kegiatan penanganan penyandang masalah social c. Melakukan penyuluhan social |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | a. Mengelola logistic bencana b. Mengelola tempat penampungan sementara bagi korban bencana |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | - Peralatan dapur umum - Tenda pengungsi, keluarga - Sandang dan pangan - Mobil DUMLAP, RTU, Tangki air - Perlengkapan pengungsi (kit ware, food ware, family kit) |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | - Perahu karet, dolpin - Pelampung (life jacket) |

**PROFIL INSTANSI/LEMBAGA YANG TERKAIT
DALAM RENCANA KONTINJENSI**

| | |
|---|---|
| 1. NAMA LEMBAGA | LANTAMAL II |
| 2. ALAMAT/ NO.TELP/FAX EMAIL | JL. BUKIT PETI-PETI, TELUK BAYUR 0751 - 767979 |
| 3. KONTAK PERSON | UTEP SUHERMAN |
| 4. JABATAN NO.TELP/HP | a. Pemberdayaan wilayah pesisir b. Pengumpulan data Potnas maritime c. Pemberdayaan SDM dan SDA/B wilayah kerja Lantamal II |
| 5. TUGAS POKOK & FUNGSI | a. Pemberdayaan wilayah pesisir b. Pengumpulan data Potnas maritime c. Pemberdayaan SDM dan SDA/B wilayah kerja Lantamal II |
| 6. TUGAS DALAM RENCANA KONTINJENSI INI | Berperan dalam semua klaster |
| 7. WILAYAH CAKUPAN | SUMATERA BARAT |
| 8. KEMAMPUAN/SUMBERDAYA YANG DIMILIKI | SDM 500 orang Kendaraan Bus 2 buah Truk 3 buah Ambulance 1 buah Tanki BBM 1 buah |
| 9. KEMAMPUAN LAIN | |

YAYASAN KOMUNITAS SIAGA TSUNAMI

merupakan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) berbentuk Yayasan yang berbasis di Kota Padang Provinsi Sumatra Barat. KOGAMI didirikan atas dasar semangat kemanusiaan untuk mengurangi risiko bencana.



KOGAMI secara *de facto* berdiri di Indonesia mulai **4 Juli 2005** dan diresmikan pada **21 September 2005** sesuai dengan Akta Pendirian No 91 tahun 2005 oleh notaris Catur Virgo, SH.

KOGAMI memiliki Visi "**KOGAMI DUTA DUNIA MEMBANGUN BUDAYA SIAGA BENCANA**". Untuk mencapai cita-cita tersebut KOGAMI terus aktif melakukan pendampingan guna meperkuat kemandirian masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

KOGAMI terus membuka peluang kerjasama baik dengan pemerintah maupun lembaga non pemerintah demi terwujudnya masyarakat yang berkebudayaan siaga bencana.

SALAM SIAGA..!!!

